

**PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN
MATURITY E-GOVERNMENT TERHADAP TRANSPARANSI
INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



Disusun Oleh:

Nama : Bayu Aji Faundra Pratama

Nomor Mahasiswa : 19312328

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN
MATURITY E-GOVERNMENT TERHADAP TRANSPARANSI
INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Bayu Aji Faundra Pratama

No. Mahasiswa: 19312328

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 7 Juni 2023

Penulis,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown, partially obscured by a handwritten signature in black ink. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'DUA BELAS RIBU RUPIAH', and 'SERI 10000'. The serial number '4068AAJX014111099' is visible at the bottom.

(Bayu Aji Faundra Pratama)

**PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN
PEMERINTAH DAERAH, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN
MATURITY E-GOVERNMENT TERHADAP TRANSPARANSI
INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Bayu Aji Faundra Pratama

No. Mahasiswa: 19312328

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 7 Juni 2023

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maulidyati Aisyah', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv))

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KEKAYAAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KUALITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN MATURITY E-GOVERNMENT TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Disusun oleh : BAYU AJI FAUNDRA PRATAMA

Nomor Mahasiswa : 19312328

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 03 Juli 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv)., CMA.

Penguji : Reni Yendrawati, Dra., M.Si., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Indonesia



Johan Arifin, Ph.D., CFra, CertIPSAS.

HALAMAN MOTO

“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras
(untuk urusan yang lain).”

(Q.S Al-Imsyirah, 94:7)

“Rasulullah bersabda: Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu,
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“If it doesn't challenge you, it won't change you.”

“Jadilah berkualitas agar dijadikan prioritas.”

“Kerjakanlah semuanya layaknya hobimu, maka kamu akan melakukan semuanya
seperti bermain.”

“Santai dalam pembawaan, tetapi serius dalam pemikiran.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Maturity E-Government Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana untuk mendapatkan gelar S-1 Jurusan Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mohon izin untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak berikut:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi yaitu Ibu Sumiyati dan Bapak Sumarno Edi Prayitno yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang sepanjang masa, serta segala dukungan penuh untuk penulis dalam menempuh pendidikan dan kehidupan. Harapnya Ibu dan Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, kebahagiaan dan barokah dari

Allah SWT. Penulis tak bisa membalas kepada Ibu dan Bapak dengan apapun kecuali dengan doa yang senantiasa kupanjatkan kepada Allah SWT.

2. Adik yang penulis sayangi yaitu Rangga Febrianto Maulana yang selalu menemani hari-hari penulis dan membuat penulis termotivasi untuk membahagiakan kalian. Serta seluruh keluarga besar yang saya sayangi yang selalu memberikan doa serta nasihat terbaik demi keberhasilan penulis.
3. Maulidyati Aisyah, SE., M.Com(Adv). Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, meluangkan waktu dan tenaga dalam proses penyusunan skripsi, memberikan banyak ilmu dan wawasan baru. Terimakasih banyak atas segala nasihat dan kesabaran selama Ibu saat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga segala ilmu-ilmu dan kebaikan Ibu akan menjadi ladang pahala dan dibalas oleh Allah SWT.
4. Reni Yendrawati, Dra., M.Si. Selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam skripsi saya.
5. Bapak Aditya Pandu Wicaksono, SE., M.Ak., Ak. dan Bapak Muhammad Fadhly Rizky Octavio, S.Ak., M.Ak. yang selalu memberi masukan dan membantu dalam proses penyusunan skripsi, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.

6. Fahrezi Denis Saputra, Mohammad Abinaya Hadiananto, Edo Zakky Muhammad Al Fatih, Dewi Kusumawati, dan Shafira Kumala selaku sahabat penulis selama kuliah. Terima kasih selalu mendukung penulis dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Terima kasih atas semua saran, pengalaman hidup, momen lucu, dan kenangan indah yang telah kita bagi bersama. Terima kasih juga karena selalu mengingatkan penulis tentang hal-hal positif selama kita bersama. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dilain waktu.
7. Teman satu perjuangan di tim ERPSIM dan MonsoonSIM “Antares” yaitu Humam Naufal Tsuraya, Javier Erlandaffa Satria Dwikamba, Saphira Pricillia Estuarine, dan Dyah Ayu Puspaningrum, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan saran dan nasihat serta membuat hari-hari penulis menjadi produktif dan semangat untuk mengikuti kegiatan apapun. Kalian semua sangat luar biasa!
8. Terimakasih untuk teman-teman grup “KEY IN” yaitu Denis, Abin, Edo, Dewi, Shafira, Ipeh, Dhea, Bella, Nadifa, Deya, Mala, Sela, Yogi, dan Dina. Terimakasih atas kenangan baik suka duka dan kerja samanya selama 4 tahun ini. Sukses selalu kawan-kawanku!
9. Janisah Indah Wulandari yang senantiasa memberikan motivasi, *support system*, semangat, dan selalu meningkatkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Syehlian Akbar Fiqri selaku sahabat yang senantiasa memberi dukungan setiap saat serta kebaikan yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas canda dan tawa selama ini.
11. Terima kasih untuk tim “Eagles” yaitu Akbar, Dani, Feren, Lestari, dan Lia, serta terima kasih juga untuk tim “Anagata Jayati” yaitu Naravastu, Faiz, dan Vya telah memberikan pengalaman di hidup penulis yang sangat berwarna dan terima kasih atas canda dan tawa yang dilalui bersama.
12. Teman *online* Discord Inasa dan Deby terimakasih atas support dan dukungan dalam menemani penulis saat mengerjakan skripsi pada tengah malam hari.
13. Terima kasih untuk teman seperbimbingan Ilham, Reza, dan Vera yang selalu memberikan saran, motivasi, dan dukungan setiap hari.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak kiranya penulis berikan atas segala doa, bantuan dan dukungan yang tak ternilai. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan kalian dengan pahala kebaikan yang berlipat. Amin.

Penulis berharap agar Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua yang telah memberikan dukungan baik secara materi maupun non materi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah disusun masih belum sempurna dan terdapat banyak kesalahan dari penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran

yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Juni 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bayu Aji Faundra Pratama', written in a cursive style.

(Bayu Aji Faundra Pratama)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN BERITA ACARA.....	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN MASALAH.....	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 SISTEM PENELITIAN	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 KAJIAN TEORI.....	11
2.1.1 <i>Legitimacy Theory</i>	11
2.1.2 <i>Institutional Theory</i>	11
2.1.3 <i>Good Governance</i>	13
2.1.4 Transparansi Informasi Keuangan	15
2.1.5 Kekayaan Pemerintah Daerah	16
2.1.6 Ukuran Pemerintah Daerah	17
2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan	17
2.1.8 <i>Maturity E-Government</i>	20
2.2 KAJIAN PUSTAKA	23

2.2.1	Penelitian Terdahulu	24
2.3	HIPOTESIS PENELITIAN.....	36
2.3.1	Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	36
2.3.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	37
2.3.3	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	38
2.3.4	Pengaruh <i>Maturity E-Government</i> Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	40
2.4	KERANGKA PENELITIAN	41
BAB III		43
METODE PENELITIAN.....		43
3.1	METODE PENELITIAN	43
3.2	POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL	43
3.3	METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA	44
3.4	DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN.....	45
3.4.1	Variabel Dependen.....	45
3.4.2	Variabel Independen	46
3.5	METODE ANALISIS DATA	50
3.6	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	51
3.7	UJI ASUMSI KLASIK	51
3.7.1	Uji Normalitas	52
3.7.2	Uji Multikolinearitas	53
3.7.3	Uji Heteroskedastisitas	53
3.8	ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA.....	54
3.9	UJI KOEFISIEN DETERMINASI (<i>Adjusted R²</i>)	55
3.10	UJI HIPOTESIS	55
3.10.1	Uji Parsial (Uji T)	56
BAB IV		57
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN		57
4.1	DESKRIPTIF SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA	57
4.2	ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF	57

4.3	UJI ASUMSI KLASIK	60
4.3.1	Uji Normalitas	60
4.3.2	Uji Multikolinearitas	61
4.3.3	Uji Heteroskedastitas	62
4.4	UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA	63
4.5	UJI KOEFISIEN DETERMINASI (<i>Adjusted R²</i>)	65
4.6	UJI HIPOTESIS	66
4.6.1	Uji Parsial (Uji T)	66
4.7	PEMBAHASAN	69
4.7.1	Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	69
4.7.2	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	71
4.7.3	Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	73
4.7.4	Pengaruh <i>Maturity E-Government</i> terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	74
BAB V		76
PENUTUP		76
5.1	KESIMPULAN	76
5.2	IMPLIKASI PENELITIAN	77
5.3	KETERBATASAN PENELITIAN	79
5.4	SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		86

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Indikator Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	46
Tabel 3. 2 Indikator Kekayaan Pemerintah Daerah	47
Tabel 3. 3 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah	48
Tabel 3. 4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	49
Tabel 3. 5 Indikator Maturity E-Government	50
Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah Tahun 2021	57
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif	58
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)	60
Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas (Uji Central Limit Theorem (CLT))	61
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)	63
Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	63
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	66
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (Uji T)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian	42
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Olah Data	86
Lampiran 2 Chi Square Table	89
Lampiran 3 Daftar Pemerintah daerah dan Hasil Pengumpulan Data Variabel Dependen dan Independen	90

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of local government wealth, size of local government, quality of financial reports, and maturity of e-government on the transparency of local government financial information. The theory used is legitimacy theory and institutional theory. The approach used is quantitative by taking secondary data from 541 local government websites and local government financial reports for 2021. This research uses the IBM SPSS Statistics 26 analysis tool. From the results of the tests conducted, it is known that local government wealth, quality of financial reports, and maturity e-government has a significant positive effect on the transparency of local government financial information, while the size of the local government has no effect on the transparency of local government financial information.

Keywords: *Transparency of Local Government Financial Information, Local Government Wealth, Size of Local Government, Quality of Financial Reports, Maturity E-Government.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah. Teori yang digunakan yaitu teori legitimasi dan teori kelembagaan. Pendekatan yang digunakan yaitu kuantitatif dengan mengambil data sekunder dari 541 website pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021. Penelitian ini menggunakan alat analisis *IBM SPSS Statistics 26*. Dari hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa kekayaan pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Maturity E-Government.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era perkembangan zaman yang begitu cepat hingga saat ini, mulai banyak teknologi yang digunakan dalam pengelolaan perusahaan hingga pemerintah. Selain perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menunjang kinerja bisnisnya, pemerintah juga tidak kalah saing untuk menunjang kinerja sistem pemerintahannya dengan teknologi. Hal ini tentu untuk meraih *Good Governance*, masyarakat pada saat era zaman dahulu hingga sekarang tentu sangat menginginkan pemerintah memiliki kinerja yang terbaik. *Good Governance* sendiri merupakan pengelolaan manajemen pemerintahan yang terpadu dan tentunya akuntabel (Puspitawati et al., 2021).

Berlangsungnya pandemi Covid-19 yang telah terjadi dua tahun lalu yang telah ditetapkan oleh WHO pada bulan Maret 2020, membuat masyarakat sekitar dan Covid-19 mulai hidup berdampingan satu sama lain (Mishra & Tripathi, 2021). Hingga saat ini pemerintah mulai bangkit secara perlahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Masyarakat tentunya menginginkan pemerintah yang lebih baik di masa masa seperti ini, adanya *Good Government* dalam pemerintahan tentunya membuat harapan yang sangat besar bagi seluruh masyarakat.

Memiliki pemerintahan yang baik tentunya pemerintah memiliki tujuan untuk bertanggung jawab mengenai apa yang akan didapatkan oleh masyarakat lalu

mengolahnya kembali ke masyarakat, sehingga di dalam pemerintahan tidak mencari citra yang baik melainkan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, adanya pelayanan publik yang baik tentunya pemerintah harus selalu mengevaluasi dan terus membenahi serta mengembangkan apa yang diperlukan kepada masyarakat sehingga mendapatkan pelayanan publik yang baik serta berkualitas.

Terdapat lima asas good public governance yang telah dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) di Indonesia yaitu transparansi, akuntabilitas, demokrasi, budaya hukum, kesetaraan, dan kewajaran. Salah satu asas good public governance tersebut dapat memberikan pengungkapan informasi yang mudah diakses oleh beberapa pihak, yaitu transparansi. Transparansi menurut Nasution dan Atika (2019) terciptanya transparansi karena adanya informasi yang tersebar luas di semua kalangan. Semua proses informasi yang berhubungan dengan pemerintahan harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan serta informasi harus mudah dimengerti dan dapat dipantau. Jadi dapat diartikan bahwa transparansi dalam pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah dalam mengakses informasi kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat memiliki hak mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah.

Pelaksanaan transparansi dalam pemerintahan Indonesia telah terlaksanakan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang berisikan keterbukaan informasi publik (Republik Indonesia, 2008). Keterbukaan informasi publik pada pasal 9 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

seluruh badan publik wajib mengumpulkan informasi publik secara berkala. Pengertian informasi publik yang dimaksud adalah kinerja dan kegiatan yang telah berlangsung pada badan publik serta juga mengenai informasi laporan keuangan. Pada pasal 7 ayat 2 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga membahas bahwa kewajiban badan publik dalam menyiapkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pasal 4 ayat 1 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Hal ini membuat setiap badan publik harus transparan kepada setiap semua pihak yang bersangkutan.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil bila dalam pengelolaan keuangan daerah yang apabila informasi di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah memenuhi syarat kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010). Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dimaksud pada PP No 71 Tahun 2010, yaitu : (1) relevan, yang dimaksud relevan yaitu informasi yang terdapat di dalamnya dapat berpengaruh dalam mengambil keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi baik masa kini, masa depan dan juga masa lalu; (2) andal, yang berarti bahwa informasi di dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta menyajikan setiap fakta baik dengan jujur dan juga dapat diverifikasi; (3) dapat dibandingkan, berarti bahwa informasi yang ada di laporan keuangan akan dapat berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada

umumnya; (4) dapat dipahami, yang berarti informasi yang di dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan juga dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan pemahaman pengguna.

Penting bagi laporan keuangan pemerintah daerah untuk mencerminkan nilai informasi yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka pemerintah daerah dianggap telah memenuhi persyaratan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, jika informasi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat berdampak pada kerugian daerah, kelemahan administrasi, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta informasi yang tidak sesuai dapat menimbulkan fraud seperti korupsi.

Kasus korupsi di pemerintahan sangat banyak macamnya, kasus korupsi tidak hanya terjadi pada pemerintah pusat saja melainkan pemerintahan daerah pun banyak terjadinya kasus korupsi. Contohnya kasus korupsi pada bulan Maret tahun 2022 yang dilakukan oleh Bupati Bogor yaitu Ade Yasin yang menjadi tersangka kasus korupsi yaitu tindakan suap kepada pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat. KPK mengungkapkan bahwa awal kasus korupsi dari penyuapan anggota tim audit BPK Jawa Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) tahun 2021, sebesar 1,024 miliar (Aida, 2022). Dengan adanya kasus tersebut tentu akuntabilitas sangat penting di dalam pemerintahan, tanpa adanya dua hal tersebut mungkin kasus kasus seperti tersebut tidak dapat diungkap.

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk pemerintahan agar tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Pada era saat ini mulai banyak pemerintah daerah sudah mulai memanfaatkan teknologi contohnya saja penggunaan *e-governance*. Penggunaan *e-governance* di Indonesia tentunya salah satu faktor pendukung adanya sistem transparansi informasi keuangan yang baik dalam pemerintahan di Indonesia. Keberadaan sistem transparansi yang efektif tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan memberikan informasi yang memadai, hal ini dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik yang merugikan dalam pemerintahan, seperti korupsi.

Tugas dalam pemerintah daerah tentu dalam salah satunya membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transparansinya yang baik dalam mengelola keuangannya agar terciptanya pemerintah yang jujur dan bersih. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Oleh karena itu semakin besarnya tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang tepat maka pemerintah perlu menerapkan prinsip transparan dan akuntabel agar tindakan korupsi dapat diminimalisir.

Terciptanya transparansi yang baik dalam pemerintahan daerah di Indonesia tentunya tak luput dari beberapa faktor yang mempengaruhi atas terciptanya akuntabilitas yang baik tersebut. Faktor faktor tersebut yaitu pendapatan asli daerah, belanja daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government*. Dengan melihat faktor tersebut akuntabilitas suatu pemerintahan dapat menjadikan

bukti pertimbangan apakah akuntabilitas pemerintahan tersebut sudah baik atau belum.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Puspa dan Rahayu (2021) membahas mengenai topik yang serupa, dan penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan informasi keuangan (transparansi). Hal ini berbanding terbalik pada penelitian Deka dan Mia (2020) menghasilkan hasil penelitian bahwa kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan (transparansi). Lalu penelitian yang membahas mengenai ukuran pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Uliarta et al (2018) menghasilkan penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keuangan (transparansi). Penelitian lain yang dilakukan oleh Adiputra et al (2018) mengenai ukuran pemerintah daerah mendapatkan hasil bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan. Masih pada penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al (2018) pada penelitian ini menghasilkan juga bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi. Hal ini berbanding terbalik pada penelitian oleh Wilopo (2017) mendapatkan kesimpulan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Kemudian pada penelitian Nurindahsari et al (2022) mengungkapkan bahwa *e-government* berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini berbanding terbalik penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2018) mendapatkan hasil bahwa *e-government*

pemerintah daerah masih belum matang dikarenakan masih banyak yang belum diakses hal ini berpengaruh terhadap transparansi yang kurang akibat tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas di atas, maka penulis menyimpulkan judul yang sesuai atas penelitian ini adalah **“Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan *Maturity E-Government* Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah kekayaan pemerintah daerah memberikan pengaruh terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah ukuran pemerintah daerah memberikan pengaruh terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia?
3. Apakah kualitas laporan keuangan memberikan pengaruh terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia?
4. Apakah *maturity e-government* memberikan pengaruh terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 TUJUAN MASALAH

1. Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap terwujudnya transparansi dalam informasi keuangan pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh *maturity e-government* terhadap terwujudnya transparansi informasi keuangan dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

▪ Akademik

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan terkait transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, baik itu pemerintahan di tingkat pemerintahan daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

▪ Masyarakat

Pada penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan meningkatkan pemahaman tentang

transparansi informasi keuangan di tingkat pemerintahan daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat berperan dalam mengawasi kinerja pemerintah dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia.

- **Pemerintah**

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah agar menyadari faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung terciptanya transparansi informasi keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dengan menjadikan pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.5 SISTEM PENELITIAN

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat terdapat lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori legitimasi, teori kelembagaan, *Good Governance*, transparansi informasi keuangan, faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi

keuangan pemerintah daerah, telaah penelitian terdahulu, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan populasi penelitian dan penentuan sampel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data penelitian, definisi dan pengukuran dari masing-masing variabel, metode analisis, dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini mendeskripsikan tentang hasil penelitian dari penelitian serta analisis data dan pembahasan berkaitan dengan pengujian hipotesis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 KAJIAN TEORI

2.1.1 *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi digunakan sebagai salah satu usaha yang bisa dilakukan dengan melakukan keterbukaan informasi dengan memanfaatkan fasilitas internet berupa situs web. Teori legitimasi pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer (1975), yang mengungkapkan bahwa teori legitimasi yaitu suatu kegiatan yang akan dilakukan organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial lingkungan dalam masyarakat. Teori legitimasi berhubungan dengan interaksi sosial antara suatu organisasi dan masyarakat, di mana pentingnya tujuan organisasi tersebut seharusnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Ratmono & Sagala, 2015). Organisasi harus melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan sesuai dengan harapan masyarakat, agar mendapatkan dukungan dan legitimasi. Organisasi pemerintah daerah wajib mengungkapkan informasi keuangan kepada publik dengan situs resmi masing-masing daerah pemerintah. Oleh karena itu pemeliharaan operasional organisasi pemerintah yang baik dan sukses mengkondisikan organisasi pemerintah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat (Deegan, 2019).

2.1.2 *Institutional Theory*

Teori kelembagaan menunjukkan bahwa organisasi harus menyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi ini adalah suatu entitas yang layak untuk didukung, agar organisasi dapat tetap berjalan. Menurut Istiqomah (2018)

mengenai teori institusional menggambarkan bahwa dalam suatu lingkungan institusional, terdapat sekelompok organisasi yang secara keseluruhan membentuk kehidupan institusional. Organisasi-organisasi ini selalu berusaha atau diharapkan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Proses ini disebut isomorfisme, di mana unit-unit dalam lingkungan organisasi meniru tindakan unit lain sehingga mereka berada dalam situasi yang serupa secara keseluruhan. Pada teori ini suatu organisasi yang berfokus pada legitimasi lebih menyesuaikan pada harapan sosial dimana organisasi itu berada. Scott (2008) menyimpulkan bahwa teori kelembagaan digunakan untuk pengambilan keputusan serta pengambilan tindakan dalam organisasi publik.

Teori Institusional memiliki tiga gaya isomorfik di dalamnya. Isomorfik adalah tahap yang mengarahkan organisasi untuk mencapai kondisi yang sama dengan organisasi lainnya. Teori institusional isomorphism terdiri dari tiga gaya yaitu *coercive*, *mimetic*, dan *normative* yang menyebabkan perkembangan menuju kesetaraan dalam suatu organisasi (Dimaggio & Powell, 1983). Berikut ini tiga gaya institusional isomorfik:

a) *Coercive*

Penyesuaian yang dilakukan oleh organisasi atau entitas karena tekanan yang kuat dari pihak eksternal. Pihak eksternal dalam konteks teori institusional ini mungkin berasal dari institusi yang lebih kuat atau tinggi, atau komunitas yang lebih besar. Pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan penyediaan layanan infrastruktur dan informasi publik karena adanya tuntutan dari masyarakat.

b) *Mimetic*

Gaya ini lebih mengacu rasa iri terhadap kesuksesan organisasi lain yang mendorong organisasi untuk meniru proses organisasi yang sukses guna mencapai hasil yang serupa. Cara ini dilakukan agar kinerja organisasi lebih efektif. Organisasi dengan sumber daya yang lebih besar cenderung mencapai tujuan dengan sukses. Organisasi baru umumnya ingin bersaing dan meniru proses yang dilakukan oleh organisasi yang sudah mapan.

c) *Normative*

Penerimaan tekanan norma atau aturan yang muncul dalam aspek tertentu sebagai bagian dari keahlian atau profesionalitas. Tekanan ini muncul karena tambahan pengetahuan dari pendidikan formal yang diterapkan dalam organisasi, yang kemudian disebut sebagai profesionalisme. Dengan meningkatnya profesionalisme, kepercayaan normatif akan muncul dalam organisasi tersebut.

2.1.3 *Good Governance*

Di Indonesia, prinsip *good governance* tercermin dalam Pasal 20 UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2004). Pasal ini mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menjamin pelayanan publik yang baik, yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat adalah melalui berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang berlaku sejak 30 April 2010 (Republik

Indonesia, 2008). Dengan adanya undang-undang ini, harapannya adalah tercipta transparansi yang baik dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat diketahui dan dapat diakses oleh masyarakat. Pada dasarnya, prinsip tata pemerintahan yang baik harus menciptakan kerjasama yang harmonis antara sektor pemerintah, sektor bisnis, dan sektor masyarakat sipil.

Pemerintah seringkali menggunakan konsep *good governance* di dalam pemerintahannya. Menurut International Monetary Fund (IMF) (2017) menyatakan bahwa *good governance* merujuk pada konsep yang meliputi berbagai aspek mengenai pengaturan suatu negara, termasuk kebijakan ekonomi, kerangka peraturan, dan kepatuhan terhadap hukum. *Good governance* yang tidak baik memberikan dorongan dan peluang yang lebih besar untuk melakukan korupsi serta penyalahgunaan jabatan publik demi keuntungan pribadi. Tindakan korupsi tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengancam integritas pasar, mengganggu persaingan yang sehat, dan menghambat pembangunan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2018) dalam rangka mewujudkan *good governance*, diperlukan perubahan dalam sistem kelembagaan (*institutional reform*) serta peningkatan manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan mencakup upaya perbaikan dalam semua aspek pemerintahan daerah, termasuk struktur dan infrastruktur yang digunakan. Hal ini dengan semakin baiknya penerapan *good governance*, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa ditingkatkan. Apabila kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, maka

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mungkin akan didukung oleh masyarakat.

2.1.4 Transparansi Informasi Keuangan

Prinsip transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ada dua bagian dalam prinsip ini, yakni komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi. Kedua aspek tersebut pada dasarnya akan sulit dilakukan dengan baik jika kinerja pemerintah tidak ditangani dengan baik. Ketika pemerintah semakin terbuka terhadap berbagai aspek layanan publik, tanggung jawab pemerintah akan terhadap semua pemangku kepentingan yang terkait dengan proses dan kegiatan di sektor publik akan meningkat. Semua tindakan yang dilakukan oleh institusi publik akan dijamin menjadi jelas oleh transparansi sehingga dapat dikontrol jalannya oleh publik dan perbaikan-perbaikan dapat dilakukan sedini mungkin jika terdapat kekeliruan (penyimpangan) sebelum terjadinya kegagalan secara menyeluruh (Fajaruddin, 2021).

Kebutuhan transparansi informasi keuangan pertama kali disebutkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Republik Indonesia, 2003). Pada UU 17 Tahun 2003 tersebut, transparansi ditetapkan sebagai salah satu asas yang menjadikan pertanggungjawaban keuangan negara sebagai kewajiban. Selanjutnya peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ditetapkannya Undang-Undang 14 tahun 2008 (Republik Indonesia, 2008). Pengelolaan informasi publik pada badan publik diatur oleh Undang-Undang ini, termasuk penekanan bahwa pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan

penyelenggara daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan daerah dan merupakan salah satu badan publik yang wajib mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

2.1.5 Kekayaan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah harus mampu mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang ada dalam menjalankan fungsi dan wewenang, terutama kewenangan fiskal. Diharapkan agar potensi sumber kekayaan di daerahnya dapat lebih dieksplorasi oleh Pemerintah daerah guna pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Pada tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat diukur berdasarkan sejauh mana kekayaannya. Pengungkapan yang meningkat berhubungan positif dengan kekayaan pemerintah daerah karena memberikan indikasi tentang kualitas kepala daerah (Uliarta et al., 2018).

Pada penelitian ini menjadikan pendapatan asli daerah sebagai alat ukur seberapa besar kecilnya dalam kekayaan suatu pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2018), kekayaan pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang merupakan jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh sumber-sumber pendapatan yang terdapat di wilayahnya melalui pengelolaan oleh pemerintah daerah, termasuk pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan memiliki pendapatan daerah yang besar, informasi yang baik dan transparan dapat disampaikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, serta menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

2.1.6 Ukuran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah tentunya memiliki ukuran pemerintahan daerah yang bervariasi setiap wilayahnya. Terdapat beberapa metode dalam mengukur ukuran pemerintahan daerah, salah satunya adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kristanto B, 2009). Selain itu, indikator lain untuk mengukur ukuran pemerintah daerah adalah total aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti yang disampaikan dalam penelitian sebelumnya (Wilopo, 2017). Aset pemerintah daerah meliputi tanah, bangunan, dan infrastruktur publik lainnya. Ukuran aset ini penting dalam membandingkan kinerja dan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi faktor transparansi dalam pemerintahan daerah.

Dalam penelitian ini, total aset digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan ukuran pemerintah daerah. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin besar tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan keterbukaan informasi publik (Adiputra et al., 2018). Total aset mencerminkan kinerja pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dengan total aset yang besar tentu harus memiliki transparansi dan keteraturan yang lebih baik. Pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar dan memiliki sistem yang lebih transparan akan mencapai efektivitas dan kinerja yang lebih baik daripada daerah dengan ukuran pemerintah daerah yang lebih kecil (Lestari & Nurkhin, 2023).

2.1.7 Kualitas Laporan Keuangan

Pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap transparansi tak dapat diabaikan. Agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus memiliki kualitas yang baik dan

memberikan manfaat serta informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Dian et al., 2018). Jika sebuah laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), maka akan mendapatkan opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada konteks pemerintahan, perlu menjalankan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan agar mendapatkan dukungan yang sah dari lembaga dan memastikan bahwa pelaporan keuangan sesuai dengan harapan publik, dan sejalan dengan konsep legitimasi.

Menurut Pasal 4 Nomor 71 Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh pemerintah, laporan keuangan pemerintah menggunakan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual bertujuan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan (Republik Indonesia, 2010). Pada laporan keuangan pemerintah daerah, audit oleh BPK harus dilakukan, dan hasil audit berupa opini audit akan memberikan informasi tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai berdasarkan opini audit pada laporan keuangan pemerintah (Wilopo, 2017).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Republik Indonesia, 2004). Opini-opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, terdiri dari empat jenis sebagai berikut:

1. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP)

Opini tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa telah disusun dengan wajar dalam semua hal yang material. Laporan tersebut mencakup posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Opini ini hanya diberikan jika sistem pengendalian internal yang ada memadai dan tidak terdapat kesalahan yang material pada pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP)

Laporan keuangan entitas yang telah diaudit menyajikan secara memadai posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Meskipun sistem pengendalian internal dianggap memadai, terdapat kesalahan yang signifikan pada beberapa pos laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian dapat diandalkan, pemilik kepentingan harus mempertimbangkan masalah yang diungkapkan oleh auditor terkait pos-pos yang dikecualikan tersebut agar menghindari kesalahan dalam pengambilan keputusan.

3. Opini “Tidak Wajar” (TW)

Opini diberikan terhadap laporan keuangan suatu entitas yang telah diperiksa dan menyatakan bahwa posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas dari entitas tersebut tidak disajikan secara memadai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian internal yang tidak memadai dan terdapat kesalahan yang signifikan pada banyak pos laporan keuangan. Oleh karena itu, secara keseluruhan, laporan keuangan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4. Opini “Tidak Menyampaikan Pendapat” (TMP)

Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan jika lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk memberikan suatu opini. Opini ini diberikan ketika terdapat nilai yang tidak dapat diyakini secara material oleh auditor karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, sehingga auditor tidak memiliki cukup bukti atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Pada kondisi tersebut, auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan.

2.1.8 *Maturity E-Government*

Kemajuan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk menerapkan *e-government* guna mendukung pengelolaan pemerintahan. Dalam implementasinya, *e-government* digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan

hasil kinerja pemerintah, baik berupa laporan keuangan maupun non-keuangan. Semakin berkembangnya penerapan *e-government* di suatu wilayah, akan berdampak pada tingkat transparansi di wilayah tersebut. Penerapan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses laporan dan rencana kebijakan pemerintah kapan pun dan di mana pun melalui platform *e-government* yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa informasi keuangan daerah harus tersedia melalui situs resmi pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2005). Oleh karena itu, keberadaan *e-government* mendukung transparansi dalam rangka mengurangi tindakan korupsi (Adiputra et al., 2018). Menurut *The World Bank Group*, *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat dan pelaku bisnis (Ulum, 2016). Dengan demikian, implementasi *e-government* memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait kinerja lembaga pemerintah.

Memulai penggunaan *e-government*, tentunya diperlukan pembangunan sistem informasi yang baik. maturity *e-government* atau kematangan *e-government* tentunya didalamnya memiliki tahapan ukuran agar sebuah *e-government* dapat dikatakan matang. Menurut penelitian Fietkiewicz et al (2017) kematangan *e-government* dapat diperoleh melalui 5 pilar yang disebutkan sebagai berikut:

i. Pilar 1: Diseminasi Informasi (Katalog)

Pada pilar ini pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh public dalam *e-government*. Sistem yang dapat mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat harus dimiliki oleh *e-government* yang matang. Aksesibilitas *e-government* yang cepat dan mudah tentunya sangat berpengaruh penting dalam kematangan sebuah *e-government*.

ii. Pilar 2: Komunikasi

Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara real time sangat penting dalam kematangan suatu *e-government*. Sarana komunikasi yang efektif, seperti layanan dukungan pelanggan, formulir kontak, atau forum diskusi, yang memungkinkan publik untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik kepada pemerintah harus disediakan oleh *e-government* yang matang.

iii. Pilar 3: Transaksi

Pilar ini membahas mengenai kemampuan untuk melakukan transaksi secara online masyarakat dengan pemerintah. *E-government* yang matang harus memiliki system layanan *financial* ataupun *non-financial* yang memungkinkan masyarakat untuk membayar pajak, mengajukan permohonan izin, atau melakukan transaksi lainnya secara elektronik, yang dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu.

iv. Pilar 4: Interoperabilitas (Integrasi)

Pilar ini melibatkan kemampuan sistem *e-government* untuk saling terhubung dan berbagi data secara efektif antara berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. *E-government* yang matang harus memiliki teknologi informasi yang terintegrasi, sehingga data dapat dipertukarkan dengan mudah dan aman di antara sistem yang berbeda. Pilar ini susah untuk direalisasikan karena perlunya merancang *system e-government* yang kompleks dan canggih yang dapat diakses antara kedua belah pihak.

v. Pilar 5: Partisipasi

Pada pilar ini akan melibatkan masyarakat publik dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan melalui mekanisme partisipasi yang lebih luas. *E-government* yang matang harus memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, seperti melalui survey online, forum publik, atau konsultasi daring.

Pilar-pilar ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

2.2 KAJIAN PUSTAKA

Berkaitan dengan penelitian mengenai transparansi informasi keuangan melalui website yang telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian ini memiliki variabel, waktu, pengumpulan sampel dan datanya berbeda

dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, perlu didukung adanya penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis, untuk melihat perbandingannya.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu sangat membantu dalam pembuatan penelitian ini untuk melengkapi dalam penyusunan penelitian. Berikut ini penelitian terdahulu yang sejalan dengan topik penelitian ini sebagai berikut:

1. Wilopo (2017) melakukan penelitian yang memiliki tujuan mencari bukti baru yang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan melalui website pemerintah daerah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu pemerintah daerah yang telah diaudit oleh BPK pada tahun 2013 sebanyak 211. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan melalui website, sedangkan untuk faktor lainnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan melalui website.
2. Pada tahun yang sama penelitian yang dilakukan oleh Uliarta et al (2018) yang memiliki tujuan pada penelitian tersebut yaitu untuk menguji apakah adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue*, umur administratif, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, dan

rasio kemandirian keuangan daerah terhadap pengungkapan laporan keuangan di seluruh provinsi Indonesia. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah (provinsi) di Indonesia tahun 2013-2015. Hasil akhir penelitian ini adalah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sebaliknya *intergovernmental revenue* dan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Lalu ukuran legislatif, kekayaan pemerintah daerah, umur administratif, diferensiasi fungsional, dan spesialisasi pekerjaan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

3. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putra et al (2018), penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dan transparansi laporan keuangan pada e-government pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel situs website kabupaten/kota sebanyak 16 dan situs website pemerintah provinsi 2 dari DKI Jakarta dan Bengkulu. Metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang digunakan oleh penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan e-government pemerintahan provinsi DKI Jakarta lebih baik daripada pemerintahan provinsi Bengkulu, hasil penelitian lainya juga mengatakan bahwa e-government masih belum dapat digunakan optimal untuk menciptakan transparansi informasi laporan keuangan kepada publik.

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dian et al (2018) memiliki tujuan yaitu melihat ada tidaknya pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja daerah, ukuran pemerintah, rasio pembiayaan hutang, tingkat kompleksitas pemerintah, kualitas laporan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah baik dalam kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu 15 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa variabel belanja daerah, ukuran pemerintah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik untuk variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintah, dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.
5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adiputra et al (2018) yang bertujuan untuk mencari bukti mengenai pengaruh ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat respon pemerintah daerah terhadap pengungkapan informasi keuangan, dan lingkungan politik pemerintah daerah terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 34 pemerintah daerah (provinsi) di Indonesia pada tahun 2016. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yaitu variabel kualitas laporan keuangan

dan lingkungan politik berpengaruh positif terhadap transparansi informasi pemerintah daerah. Pada sisi lain variable ukuran pemerintah daerah dan tingkat respon pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi informasi keuangan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Latif et al (2019) memiliki tujuan yaitu melakukan evaluasi terhadap *e-government* kota bandung ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas informasi. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah *e-government* Kota Bandung. Penelitian ini membuahkan hasil yaitu *e-government* Kota Bandung masih perlu adanya penyempurnaan baik perbaikan dan pengembanagan dalam berbagai aspek walaupun begitu *e-government* dapat menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel.
7. Penelitian tahun selanjutnya yang diteliti oleh Deka dan Mia (2020) memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan jumlah penduduk terhadap pengungkapan *internet budgeting reporting*. Sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 154 kabupaten/kota di pulau Sumatra. Perolehan hasil yang didapat oleh penelitian ini adalah variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *internet budgeting reporting*. Untuk variabel kekayaan pemerintah daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *internet budgeting reporting*.

8. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Puspa dan Rahayu (2021) yang memiliki tujuan penelitian yaitu menguji adanya kekayaan daerah, umur administratif, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan untuk sampel penelitian yaitu sebanyak 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini adalah variabel kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik untuk variabel umur administratif dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah daerah.
9. Tahun berikutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Nurindahsari et al (2022) yang memiliki tujuan dalam penelitian yaitu menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi *e-government* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 6 SKPD di pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini mengambil sampel 6 SKPD Kota Bandung. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa penerapan *e-government* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan untuk penerapan *e-government* tidak signifikan berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang dan Tahun	Variabel	Sampel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurindahsa ri et al (2022)	Independen: Sistem Informasi <i>E-Government</i> Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	6 SKPD di pemerintahan Kota Bandung.	Sistem Informasi E-Government berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan tidak signifikan berpengaruh terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Puspa dan Rahayu (2021)	Independen: Kekayaan Pemerintah Daerah, Umur Administrasi, dan Indeks	Informasi Keuangan 34 provinsi di Indonesia	Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap

		<p>Pembangunan Manusia</p> <p>Dependen:</p> <p>Pengungkapan Informasi Keuangan Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah.</p>		<p>Pengungkapan Informasi Keuangan Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah</p> <p>Umur Administrasi dan Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Melalui Website Resmi Pemerintah Daerah</p>
3	Deka dan Mia (2020)	<p>Independen:</p> <p>Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Jumlah Penduduk</p>	<p>Kuantitatif</p> <p>154 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera</p>	<p>Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Internet Budgeting Reporting</p>

		Dependen: Internet Budgeting Reporting		Kekayaan Pemerintah Daerah dan Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Internet Budgeting Reporting
4	Latif et al (2019)	Independen: <i>E-Government (e- Government, e- Budgeting (e- Procurement))</i> Dependen: Transparansi dan Akuntabilitas	E-Government kota Bandung	E-Government kota Bandung menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan, walaupun masih sedikit kurang dalam penyempurnaan.
5	Adiputra et al (2018)	Independen: Ukuran Pemda, Kualitas Laporan Keuangan Pemda, Tingkat Respon	34 Provinsi di Indonesia	Kualitas Laporan Keuangan dan Lingkungan Politik berpengaruh positif terhadap

		<p>Pemda, dan</p> <p>Lingkungan Politik</p> <p>Dependen:</p> <p>Keterbukaan</p> <p>(Transparansi)</p> <p>Informasi</p> <p>Pemerintah Daerah</p>		<p>Keterbukaan</p> <p>Informasi</p> <p>Pemerintah Daerah</p> <p>Ukuran Pemda dan</p> <p>Tingkat Respon</p> <p>Pemda tidak</p> <p>berpengaruh secara</p> <p>signifikan terhadap</p> <p>Keterbukaan</p> <p>Informasi</p> <p>Pemerintah Daerah</p>
6	Dian et al (2018)	<p>Independen:</p> <p>Pendapatan Asli</p> <p>Daerah, Dana</p> <p>Alokasi Umum,</p> <p>Belanja Daerah,</p> <p>Ukuran Pemerintah,</p> <p>Rasio Pembiayaan</p> <p>Hutang,</p> <p>Kompleksitas</p> <p>Pemerintah,</p> <p>Kualitas Laporan</p>	15 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan	<p>Belanja Daerah,</p> <p>Ukuran Pemerintah,</p> <p>dan Tingkat</p> <p>Kesejahteraan</p> <p>Masyarakat</p> <p>berpengaruh positif</p> <p>terhadap Tingkat</p> <p>Transparansi</p> <p>Informasi Keuangan</p> <p>Pemerintah Daerah</p>

		Keuangan, dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Dependen: Tingkat Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah		Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Pembiayaan Hutang, Kompleksitas Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
7	Putra et al (2018)	Independen: Penerapan <i>E-Government</i> Dependen: Transparansi Informasi Keuangan	18 Sistem <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Bengkulu	Penerapan <i>E-Government</i> di Indonesia masih belum maksimal untuk saat ini, dikarenakan <i>e-government</i> DKI Jakarta dan Bengkulu masih

				dalam tahap pematangan dikarenakan beberapa masih belum dapat diakses.
8	Uliarta et al (2018)	<p>Independen:</p> <p>Ukuran Pemda, Ukuran Legislatif, Kekayaan Pemda, <i>Intergovernmental revenue</i>, Umur Admsinitratif, Diferensiasi Fungsional, Spesialisasi Pekerjaan, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>Dependen:</p> <p>Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan</p>	LKPD seluruh provinsi di Indonesia 2013-2015	<p>Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.</p> <p>Kekayaan Pemda, Umur Administratif, Diferensiasi Fungsional,</p>

				<p>Spesialisasi Pekerjaan, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan.</p>
9	Wilopo (2017)	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Daerah, Kompleksitas Pemerintah, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Kualitas Laporan Keuangan</p> <p>Dependen:</p>	<p>254 Pemerintah Daerah di Indonesia yang telah di audit oleh BPK.</p>	<p>PAD, Ukuran Daerah, Kompleksitas Pemerintah, Belanja Daerah, Rasio Pembiayaan Utang, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh kepada akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.</p> <p>Sedangkan Tingkat Kesejahteraan</p>

		Akuntabilitas dan Transparansi		Masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah.
--	--	-----------------------------------	--	---

2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

2.3.1 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Argumen teori legitimasi, upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan legitimasinya di mata publik dilakukan melalui tindakan-tindakan yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Upaya ini dapat dipengaruhi oleh kekayaan pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kekayaan pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah.

Dengan memiliki kekayaan yang cukup, pemerintah daerah memungkinkan terciptanya kemampuan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan mereka dengan transparan. Sumber daya dapat dialokasikan secara efisien, pengeluaran dapat dipantau, dan laporan keuangan yang lebih terperinci dapat disajikan kepada publik. Akibatnya, transparansi informasi keuangan tersebut dapat mencerminkan akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah daerah.

Pada penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kekayaan pemerintah daerah dengan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah mendapatkan hasil penelitian bahwa yang kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, penelitian ini dilakukan oleh Uliarta et al (2018) dan Deka & Mia (2020). Hal ini berbanding terbalik menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspa dan Rahayu (2019) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya temuan perbedaan tersebut peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H1: Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Pada konteks ini, sesuai dengan konsep teori institusional yaitu ukuran pemerintah daerah (total aset) dapat dipahami sebagai indikator tekanan *coercive* yang berhubungan dengan sumber daya dan tuntutan eksternal terhadap transparansi informasi keuangan. Semakin besar total asset, semakin besar tuntutan yang diberikan oleh masyarakat terkait pemanfaatan aset tersebut. Informasi keuangan maupun non keuangan diinginkan oleh pihak eksternal seperti masyarakat untuk melihat seberapa transparan pemerintah terkait pemanfaatan aset daerah yang dimiliki agar dimanfaatkan dalam fasilitas kepentingan publik.

Semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin penting bagi transparansi pengelolaan keuangan mereka. Akibatnya, terdapat tekanan eksternal yang lebih besar dari masyarakat, dan organisasi pemantau untuk menuntut tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam hal informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab yang lebih besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik oleh pemerintah daerah yang memiliki lebih banyak sumber daya agar tidak terjadi tindakan penyimpangan seperti korupsi.

Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai ukuran pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh Wilopo (2017) dan Adiputra et al (2018) mendapatkan hasil bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian et al (2018), Uliarta et al (2018), dan Deka & Mia (2020) yang menghasilkan penelitian bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya beberapa perbedaan dalam penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Pada teori legitimasi, menjelaskan bahwa citra positif pemerintah dan dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya perlu

dipertahankan dalam berjalanya sebuah organisasi. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan yang baik dapat memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah karena meningkatkan kepercayaan dan transparansi informasi keuangan yang disajikan. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan dapat menjadi faktor penting dalam mempengaruhi tingkat transparansi informasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemangku kepentingan.

Opini auditor Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan yang baik menunjukkan bahwa pengungkapan transparansi laporan keuangan yang telah dilakukan telah sesuai. Oleh karena itu, ketika laporan keuangan suatu pemerintah memiliki kualitas yang baik, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dari pemerintah daerah tersebut juga baik.

Menurut penelitian terdahulu menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah yang telah diteliti oleh Wilopo (2017) dan Dian et al (2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputra et al (2018) mendapatkan hasil bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Karena terdapat perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2.3.4 Pengaruh *Maturity E-Government* Terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan teori *institutional* tekanan *mimetic* menyatakan bahwa praktik dan kebijakan yang diadopsi oleh organisasi sejenis yang dianggap berhasil akan ditiru atau disesuaikan oleh organisasi atau entitas tersebut. Dalam konteks ini, tekanan *mimetic* diwujudkan sebagai dorongan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan oleh pemerintah daerah, dengan melihat pemerintah daerah lain yang telah berhasil meningkatkan transparansi melalui pengembangan *e-government*.

Tingkat transparansi informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah tersebut akan semakin tinggi seiring dengan matang dan berkembangnya sistem *e-government*, sebagai respons terhadap tekanan *mimetic* dari pemerintah daerah lain yang telah berhasil meningkatkan transparansi informasi keuangannya melalui pengembangan *e-government*. Hal ini membuat pemaparan informasi aktivitas keuangan dan non-keuangan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemaparan informasi keuangan dan non-keuangan memerlukan sebuah wadah untuk dipublikasikan. Oleh sebab itu, diharapkan *e-government* pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator pemaparan informasi aktivitas pemerintah daerah.

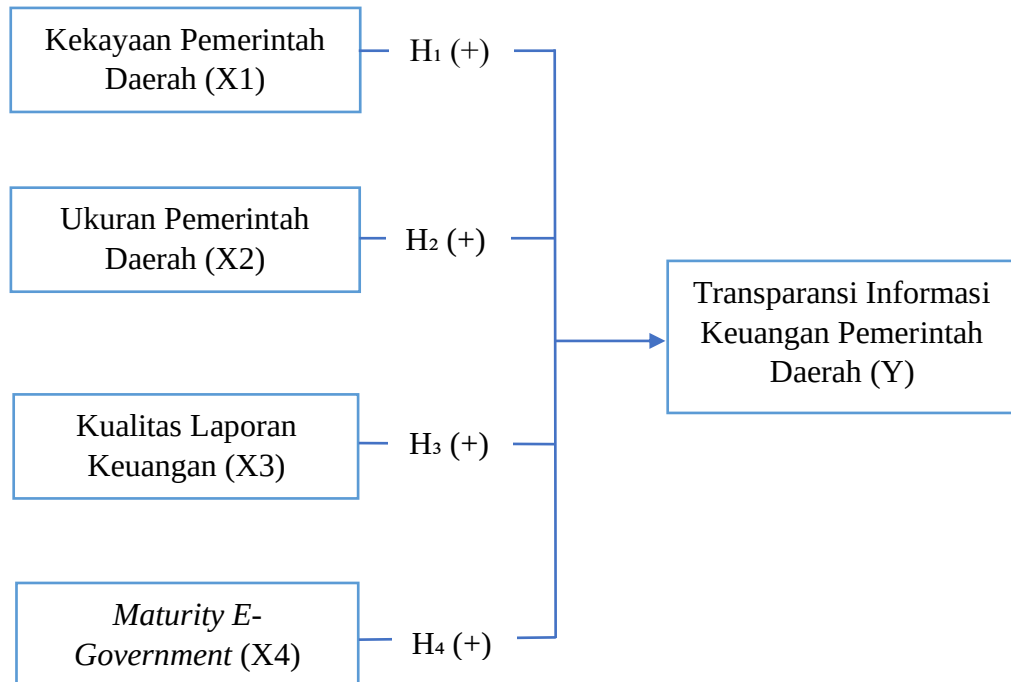
Penelitian *maturity e-government* yang dilakukan oleh Nurindahsari et al (2022) menyatakan bahwa penelitian mengenai *maturity e-government* tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Berbeda

dengan penelitian Putra et al (2018) dan Latif et al (2019) yang menyatakan bahwa dalam *maturity e-government* mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Dengan adanya perbedaan antara penelitian sebelumnya maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Maturity e-Government* berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2.4 KERANGKA PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari faktor-faktor independen (X) terhadap faktor dependen (Y), yaitu pengaruh dari kekayaan pemerintah daerah (X1), ukuran pemerintah daerah (X2), kualitas laporan keuangan (X3), dan *maturity e-government* (X4) terhadap tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Kerangka konseptual digunakan sebagai penjelasan konsep dari penelitian ini. Kerangka ini akan memberikan arah konsep penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara beberapa variabel. Visualisasi kerangka ini dapat ditemukan pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif serta menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan melalui laporan keuangan daerah yang telah diaudit BPK dan website pemerintah daerah Indonesia. Variabel dependen yang akan digunakan yaitu transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Variabel independen yang akan digunakan yaitu kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-governance*.

3.2 POPULASI DAN PENENTUAN SAMPEL

Pengambilan data diambil melalui 541 data dari pemerintah daerah di Indonesia, mulai dari 34 provinsi, 414 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Data diambil melalui *e-Governance* berupa website resmi pemerintah daerah di Indonesia. Data lainnya diambil melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 yang sudah di audit oleh BPK dan mendapatkan opini dari BPK. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah yang memiliki laporan keuangan pada tahun 2021.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit dan mendapatkan opini audit.

3. Pemerintah daerah yang memiliki *website* resmi milik pemerintah daerah.

Jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif adalah setidaknya 30 data yang harus terlibat dalam proses penelitian (Kerlinger & Lee, 2000). Dengan menggunakan sampel yang cukup besar, peneliti dapat mengurangi kemungkinan bias dan variabilitas yang tidak diinginkan, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 541.

3.3 METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan Data yang akan digunakan berasal dari situs resmi pemerintah daerah di Indonesia tahun 2021 dengan menggunakan data sekunder. Informasi yang akan diambil dari situs web tersebut meliputi ukuran pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah. Data ini diperoleh dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui website resmi pemerintah daerah pada Tahun 2022. Data tentang kekayaan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah, serta laporan keuangan pemerintah daerah akan diambil dari situs web resmi pemerintah daerah. Pada penelitian ini, juga akan digunakan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aksesibilitas website pemerintah

daerah, kelengkapan pengukuran yang dilakukan, dan perkembangan website pemerintah daerah.

3.4 DEFINISI DAN PENGUKURAN VARIABEL PENELITIAN

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 2 variabel yaitu variable *independent* dan *dependent*. Variabel *independent* dalam penelitian ini adalah Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Maturity e-Government* (Kematangan *e-government*). Untuk variabel *dependent* yaitu Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Dari empat variabel independent tersebut yang membuat alasan terbentuknya dari adanya transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Transparansi informasi keuangan pemerintah daerah merupakan prinsip penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas keuangan pemerintah daerah. Prinsip ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat terkait penggunaan dan pengelolaan keuangan publik. Penggunaan sistem scoring digunakan oleh peneliti untuk mengukur variabel ini, dengan memberikan penilaian sesuai dengan yang dilakukan. Jika tidak ditemukannya indicator di dalam website resmi pemerintah daerah, maka akan diberikan 0 poin. Sebaliknya, jika ditemukannya indicator di dalam website resmi pemerintah daerah, maka akan

diberikan 1 poin. Skor final diperoleh dari total poin indikator yang diperoleh. Skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 4 poin (Adiputra et al., 2018).

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Point	Referensi
1.	Jika website pemerintah daerah dapat ditemukan di halaman pertama pencarian di google dengan hanya mengetikkan nama pemerintah daerah.	+1	(Adiputra et al., 2018)
2.	Cukup tiga kali klik atau kurang yang diperlukan untuk melihat informasi keuangan di situs web pemerintah daerah.	+1	
3.	Bila data keuangan dapat diunduh dalam berbagai format.	+1	
4.	Jika ada informasi keuangan sebelumnya di situs web pemerintah daerah.	+1	

3.4.2 Variabel Independen

Pada penelitian ini menggunakan 4 variabel independen, yaitu kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government*.

- Kekayaan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan yang berasal dari kegiatan ekonomi yang terjadi di

wilayah pemerintahan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain sebagainya. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima oleh suatu pemerintah daerah, maka semakin besar juga tingkat kekayaan pemerintah daerah tersebut. Pada penelitian ini pengukuran kekayaan pemerintah daerah menggunakan indikator pendapatan asli daerah (PAD) yang sesuai dalam penelitian sebelumnya (Uliarta et al., 2018).

Tabel 3. 2 Indikator Kekayaan Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Referensi
1	Kekayaan pemerintah daerah = Log Pendapatan Asli Daerah (PAD)	(Uliarta et al., 2018)

- Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah tersebut. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin besar pula kemampuan dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan memanfaatkan aset tersebut untuk kepentingan masyarakat. Hal inilah yang membuat ukuran pemerintah daerah sebagai latar belakang transparansi informasi keuangan pemerintahan daerah. Pada penelitian ini pengukuran ukuran pemerintah daerah menggunakan indikator total asset (total asset yang

terdapat pada LKPD) yang sesuai dalam penelitian sebelumnya (Adiputra et al., 2018).

Tabel 3. 3 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Referensi
1	Ukuran pemerintah daerah = Log Total Asset (Total asset yang terdapat pada LKPD)	(Adiputra et al., 2018)

- Kualitas laporan keuangan semakin baik dan sejalan dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka laporan keuangan akan terpublikasi dan mudah dilihat oleh berbagai pihak. Hal ini dapat menggalang kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal. Kualitas laporan keuangan dapat diukur melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021. Adapun opini audit yang di maksud yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) (Adiputra et al., 2018). Pengukuran variabel kualitas laporan keuangan menggunakan skala ordinal. Skala ordinal adalah jenis skala pengukuran yang mengklasifikasikan atau mengurutkan data dalam bentuk kategori atau tingkatan yang memiliki urutan atau hierarki tertentu.

Tabel 3. 4 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

No.	Indikator	Point	Referensi
1.	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4	(Adiputra et al., 2018)
2.	Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3	
3.	Opini Tidak Wajar (TW)	2	
4.	Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	1	

- *Maturity e-Government* atau kematangan e-Government dapat dilihat dari matang dan stabilnya e-Government yang dimiliki oleh suatu pemerintah akan menjadi alat atau akomodasi untuk pemerintah memaparkan hasil kinerja secara terbuka serta mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Variabel ini menggunakan sistem skoring dengan memberikan penilaian sesuai dengan yang dilakukan. Pemberian 0 poin akan diberikan ketika tidak ditemukannya indikator di dalam *website* resmi pemerintah daerah. Sebaliknya, pemberian 1 poin akan diberikan ketika ditemukannya indikator di dalam *website* resmi pemerintah daerah. Skor final diperoleh dari total poin indikator yang diperoleh. Skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 5 poin (Fietkiewicz et al., 2017).

Tabel 3. 5 Indikator *Maturity E-Government*

No.	Indikator	Point	Referensi
1.	Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website	+1	(Fietkiewicz et al., 2017)
2.	Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website	+1	
3.	Adanya Kegunaan Katalog pada Website	+1	
4.	Adanya Kegunaan transaksi pada Website	+1	
5.	Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) pada Website	+1	

3.5 METODE ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan adalah regresi berganda. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, data akan dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik. Tujuan dari Statistik Deskriptif adalah untuk memahami bagaimana data terdistribusi, sementara Uji Asumsi Klasik akan digunakan untuk menguji validitas model regresi. Setelah model regresi terbukti valid, analisis akan dilanjutkan dengan menggunakan regresi berganda, koefisien determinasi (R^2), dan uji parsial (Uji T). Penelitian ini akan menggunakan

perangkat lunak SPSS versi 26 untuk melakukan analisis data, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan memfasilitasi pengambilan keputusan.

3.6 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran mengenai kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Analisis statistik deskriptif dapat melihat nilai-nilai seperti ukuran pemusatan data (mean), ukuran penyebaran data (standar deviasi), varians, maksimum, minimum, sum, range, dan varian (Ghozali, 2018). Metode ini menerapkan penyajian data melalui tabel serta menghitung nilai maksimum, nilai minimum, mean, dan standar deviasi. Namun, penting untuk diingat bahwa statistik deskriptif bukanlah alat untuk menguji hipotesis, melainkan digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data dengan menghitung karakteristik data yang sedang dianalisis agar lebih jelas.

3.7 UJI ASUMSI KLASIK

Penelitian ini melakukan Uji Asumsi Klasik dengan maksud untuk memeriksa apakah model regresi yang digunakan tepat. Sebelum melanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk mengevaluasi akurasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan model regresi yang telah diusulkan dalam penelitian. Dengan demikian, uji asumsi klasik menjadi langkah awal yang penting dalam melakukan

analisis regresi. Uji asumsi klasik yang akan dilakukan pada penelitian ini terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah distribusi variabel dependen, variabel independen, dan model regresi berdistribusi normal atau tidak normal. Jika data berdistribusi normal, maka data tersebut dapat diandalkan dan digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dan uji *Central Limit Theorem (CLT)*. Hasil dari uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* akan menunjukkan apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Jika hasilnya menunjukkan nilai signifikan di atas 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal, sedangkan jika hasilnya menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka data residual dianggap tidak berdistribusi normal. Apabila data penelitian masih cenderung tidak normal maka akan menggunakan asumsi uji *Central Limit Theorem (CLT)*. Uji *Central Limit Theorem (CLT)* akan berlaku bila jumlah data penelitian sangat banyak ($n > 30$) maka asumsi normalitas akan diabaikan atau dapat dikatakan data akan mendekati normal (Gujarati & Porter, 2009). Menurut Morissan (2016), juga menyatakan bila adanya informasi yang banyak mengenai distribusi aktual variabel tidaklah perlu, selama terdapat jumlah sampel yang cukup dari variabel tersebut yang dapat didistribusikan secara normal. Menurut Bluman (2012) menyampaikan pendapatnya bahwa ketika jumlah sampel yang diambil secara acak semakin banyak, distribusi probabilitas dari nilai rata-rata sampel tersebut akan cenderung mengikuti distribusi normal. Jika ukuran sampel cukup besar, uji *Central Limit*

Theorem (CLT) dapat diterapkan. Penting untuk memastikan bahwa data residual berdistribusi normal atau mendekati normal agar model regresi yang dihasilkan dapat diandalkan.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas merupakan metode statistik yang dipergunakan untuk mengidentifikasi keberadaan hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi (Hair et al., 2014). Uji ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel independen saling mempengaruhi secara signifikan atau terdapat masalah multikolinearitas yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak akurat atau tidak dapat diandalkan. Penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mengukur uji multikolinearitas. Penggunaan VIF dalam uji ini akan mendapatkan hasil sejauh mana variasi dalam estimasi koefisien regresi dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai VIF dalam suatu variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$ maka variabel tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2018).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam variasi residual dari satu observasi ke observasi lain dalam model regresi (Sutopo & Slamet, 2017). Jika variasi residual antar observasi tetap konstan, maka model dianggap *homoskedastic*, tetapi jika berbeda maka dianggap heteroskedastis. Sebuah model regresi yang baik adalah yang homoskedastis, yaitu memiliki varians residual yang tetap. Untuk mengetahui apakah terdapat

heteroskedastisitas dalam penelitian, ini menggunakan uji White. Untuk melakukan uji white, langkah pertama adalah mencari nilai *chi square* hitung dengan mengalikan jumlah observasi (N) dengan nilai R kuadrat menggunakan rumus $N \times R^2$. Setelah mendapatkan nilai *chi square* hitung, langkah selanjutnya adalah mencari nilai *chi square* tabel dengan menggunakan rumus $Df = k-1$. Kemudian, perhatikan tabel *chi square* untuk menentukan apakah nilai *chi square* hitung lebih besar atau lebih kecil daripada nilai *chi square* tabel (Tafakul et al., 2021). Pengambilan keputusan dalam pengujian uji White yaitu apabila nilai *chi square* hitung lebih kecil dari pada nilai *chi square table* maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.8 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis ini untuk menguji pengaruh mengenai kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

X_1 = Kekayaan Pemerintah Daerah

X_2 = Ukuran Pemerintah Daerah

X_3 = Kualitas Laporan Keuangan

X_4 = *Maturity E-Government*

ε = Error

3.9 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen dalam suatu model regresi. Ketika variabel independen ditambahkan dalam model regresi, nilai *Adjusted R-squared (Adj R²)* dapat meningkat atau menurun tergantung pada seberapa baik variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel baru tersebut (Ghozali, 2018). Rentang koefisien determinasi antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1, informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen semakin besar yang diberikan oleh variabel independen.

3.10 Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2016), hipotesis adalah hasil sementara terhadap rumusan masalah yang belum tentu hasilnya sesuai dengan hasil penelitian dimana hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Maksud dari masih bersifat sementara adalah hasil tersebut belum sesuai dengan fakta-fakta hasil pengumpulan data namun masih berdasarkan teori yang relevan. Untuk itu, peneliti melakukan pengujian hipotesis dengan Uji Parsial (T)

3.10.1 Uji Parsial (Uji T)

Pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji parsial (Uji T). Uji parsial (Uji T) digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang dugaan terkait hipotesis yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian, yaitu mengenai pengaruh variabel independen secara terpisah dalam menjelaskan variabel dependen. Cara yang digunakan dalam pengujian uji T adalah dengan mengevaluasi nilai signifikansi. Penelitian ini menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 DESKRIPTIF SUMBER DAN PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini memiliki populasi yang terdiri dari 541 pemerintah daerah baik itu dalam cakupan provinsi kabupaten atau kota pada tahun 2021. Data ini menggunakan data keuangan dan non-keuangan yang didapatkan pada website pemerintah daerah dan juga data dari laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Berikut adalah data persebaran pemerintahan daerah yang diperoleh:

Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah Tahun 2021

No	Tingkat Pemerintah Daerah	Jumlah
1	Provinsi	34
2	Kabupaten	414
3	Kota	93
Total		541

4.2 ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Analisis ini berfungsi untuk memaparkan informasi terkait variabel penelitian yang dilihat dari rata-rata, varian, standar deviasi, varian, sum, range, dan varian (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini uji deskriptif akan menunjukkan gambaran dari masing-masing variabel penelitian yang diolah.

Di bawah ini adalah pemaparan uji statistik deskriptif sampel perusahaan secara simultan:

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_KPD	541	9.69	13.62	11.6818	0.60143
X2_UPD	541	11.90	14.74	12.5018	0.32933
X3_KLK	541	1.00	4.00	3.9168	0.33126
X4_MEG	541	1.00	4.00	2.1922	0.55446
Y_TIK	541	1.00	3.00	1.9760	0.53867
Valid N (listwise)	541				

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Uji statistik deskriptif di atas memaparkan informasi penelitian dari seluruh variabel antara lain nilai maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Mean menunjukkan rata-rata populasi yang diestimasi dari sampel. Standar deviasi menunjukkan dispersi rata-rata dari sampel. Maks dan min menunjukkan besaran nilai tertinggi dan terendah dari gambaran sampel penelitian.

Berdasarkan tabel diatas, uji statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa variabel independen Kekayaan Pemerintahan Daerah memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 9,69. Di sisi lain untuk nilai terbesar (maksimum) 13,62. Sementara itu nilai rata-rata (mean) Kekayaan Pemerintah Daerah sebesar 11,6818 dan standar deviasi nya 0,60143.

Variabel Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 11,90. Di sisi lain untuk nilai terbesarnya (maksimum) sebesar 14,74.

Sedangkan untuk nilai rata-rata (mean) Ukuran Pemerintah Daerah adalah 12,5018 dan standar deviasi nya 0,32933.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki nilai terkecil (minimum) sebesar 1. Di sisi lain untuk nilai terbesarnya (maksimum) 4. Sementara itu nilai rata-rata (mean) Kualitas Laporan Keuangan adalah 2,1922 dan standar deviasi sebesar 0,55446.

Variabel Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan nilai terkecil (minimum) sebesar 1. Di sisi lain itu nilai terbesar (maksimum) sebesar 4. Sedangkan untuk nilai rata-rata (mean) Kualitas Laporan Keuangan sebesar 3,9168 dan standar deviasi nya sebesar 0,33126.

Variabel *Maturity E-Government* menunjukkan nilai terkecil (minimum) sebesar 1 yang. Di sisi lain nilai terbesar (maksimum) sebesar 4. Sementara itu nilai rata-rata (mean) *Maturity E-Government* sebesar 2,1922 sementara itu standar deviasinya sebesar 0,55446.

Variabel Transparansi Informasi Keuangan menunjukkan nilai terkecil (minimum) sebesar 1. Sementara itu nilai terbesar (maksimum) sebesar 3. Di sisi lain untuk nilai rata-rata (mean) Transparansi Informasi Keuangan sebesar 1,9760 dan standar deviasinya sebesar 0,53867.

4.3 UJI ASUMSI KLASIK

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang sedang dianalisis memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, digunakan metode Uji *Kolmogorov-Smirnov*. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, dengan parameter bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang sedang dianalisis tidak memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* di dalam penelitian ini:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas (Uji *Kolmogorov-Smirnov*)

Keterangan	Unstandardized Residual	Alpha
N	541	0.05
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama proses regresi data tidak berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan data menggunakan data ordinal yang didalamnya yang membuat data tidak bisa berdistribusi normal. Maka pengujian normalitas yang akan digunakan pada penelitian ini juga menggunakan uji *Central Limit Theorem* (CLT) yang menjelaskan bahwa bila jumlah observasi (n) lebih besar dari 30 ($n > 30$), maka

semakin besar jumlah observasi maka akan mendekati data berdistribusi normal.

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas (Uji Central Limit Theorem (CLT))

Jumlah Sampel (N)	<i>Central Limit Theorem</i> (CLT)	Keterangan
541	$n > 30$	Terdistribusi normal

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Dari hasil tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah sampel (N) sebesar 541 sampel, yang berarti bahwa jumlah sampel (n) lebih besar dari 30. Pada pengujian ini maka menunjukkan bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal atau asumsi normalitas dapat diabaikan dan dapat dikatakan sampel besar.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dengan melihat pada hasil perhitungan nilai Tolerance dan VIF. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018). Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Tolerance	VIF	Keterangan
X1_KPD	0.289	3.464	Bebas Multikolinearitas
X2_UPD	0.320	3.128	Bebas Multikolinearitas
X3_KLK	0.944	1.060	Bebas Multikolinearitas
X4_MEG	0.785	1.274	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, variabel Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, *Maturity E-Government* mempunyai nilai Tolerance lebih dari ($>$) 0,10. Begitu juga dengan nilai VIF masing – masing memiliki nilai kurang dari ($<$) 10. Dengan hal ini menandakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel independen dan model regresi bebas dari gejala multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varian dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji White. Pengambilan keputusan dalam pengujian uji White yaitu apabila nilai *chi square* hitung lebih kecil dari pada nilai *chi square table* maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White)

Model	Df	N	R ²	χ^2 hitung	χ^2 tabel	Keterangan
1	9	541	0,023	12,443	16,919	Bebas Heteroskedastistas

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa model persamaan regresi mempunyai nilai χ^2 hitung sebesar 12,443 dan nilai χ^2 tabel sebesar 16,919. Dengan hal ini pengujian melalui uji White mendapatkan kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan χ^2 hitung < χ^2 tabel ($12,443 < 16,919$).

4.4 UJI ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Uji Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak variabel bebas terhadap variabel terikat yang telah dimoderasi. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Analisi Regresi Linier Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-0.741	0.936		-0.791	0.429
X1_KPD	0.122	0.062	0.136	1.956	0.048
X2_UPD	-0.024	0.108	-0.015	-0.221	0.825
X3_KLK	0.205	0.063	0.126	3.275	0.001
X4_MEG	0.388	0.041	0.400	9.484	0.000

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Dari tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan karena masih memiliki nilai sig. $0,048 < 0,05$.
- Variabel Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan karena memiliki nilai sig. $0,825 > 0,05$.
- Variabel Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan karena memiliki nilai sig. $0,001 < 0,05$.
- Variabel *Maturity E-Government* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Transparansi Informasi Keuangan karena memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai koefisien regresi maka persamaan regresi linear berganda yang dapat terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = -0,741 + 0,122 X_1 - 0,024 X_2 + 0,205 X_3 + 0,388 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai intersep konstanta senilai $-0,741$ sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* adalah sama dengan nol / konstan, maka besarnya nilai transparansi informasi keuangan sebesar $-0,741$.
2. Nilai koefisien regresi variabel kekayaan pemerintah daerah sejumlah $0,122$. Sehingga jika nilai variabel kekayaan pemerintah daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel transparansi informasi keuangan

akan bertambah sebesar 0,122 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.

3. Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sejumlah – 0,024. Sehingga jika nilai variabel ukuran pemerintah daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel transparansi informasi keuangan akan berkurang sebesar – 0,024 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
4. Nilai koefisien regresi variabel kualitas laporan keuangan sejumlah 0,205. Sehingga jika nilai variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar satu satuan, maka variabel transparansi informasi keuangan akan bertambah sebesar 0,205 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
5. Nilai koefisien regresi variabel *maturity e-government* sejumlah 0,388. Sehingga jika nilai variabel *maturity e-government* naik sebesar satu satuan, maka variabel transparansi informasi keuangan akan bertambah sebesar 0,388 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.

4.5 UJI KOEFISIEN DETERMINASI (*Adjusted R²*)

Pada penelitian ini, didapatkan hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.502 ^a	0.252	0.247

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada tabel diatas, dapat kita lihat nilai koefisien determinasi (*Adj. R Square*) sebesar 0,247 atau 24,7%. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yaitu kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu transparansi informasi keuangan sebesar 24,7%. Sisanya sebesar 75,3% diberikan pengaruh oleh variabel lain diluar model regresi.

4.6 Uji HIPOTESIS

4.6.1 Uji Parsial (Uji T)

Uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial (Uji T)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-0.741	0.936		-0.791	0.429	
X1_KPD	0.122	0.062	0.136	1.956	0.048	H ₁ diterima
X2_UPD	-0.024	0.108	-0.015	-0.221	0.825	H ₂ ditolak
X3_KLK	0.205	0.063	0.126	3.275	0.001	H ₃ diterima
X4_MEG	0.388	0.041	0.400	9.484	0.000	H ₄ diterima

Sumber: Hasil dari olah data sekunder, 2023

Uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah uji statistik dengan hasil sebagai berikut:

- i. Pengujian hipotesis pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel kekayaan pemerintah daerah. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi kekayaan pemerintah daerah sebesar 0,122. Pada tingkat signifikansi sebesar $0,048 < 0,05$ maka dapat diasumsikan hipotesis ini signifikan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima atau didukung.

- ii. Pengujian hipotesis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel ukuran pemerintah daerah. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi kekayaan pemerintah daerah sebesar $-0,024$. Pada tingkat signifikansi $0,825 > 0,05$ maka dapat diasumsikan hipotesis ini tidak signifikan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama ditolak atau tidak diterima.

- iii. Pengujian hipotesis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi kualitas laporan keuangan sebesar 0,205. Demikian tingkat signifikansinya adalah $0,001 < 0,05$ maka dapat diasumsikan hipotesis ini signifikan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima atau didukung.

- iv. Pengujian hipotesis pengaruh *maturity e-government* terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel *maturity e-government*. Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa *maturity e-government* berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan. Nilai koefisien regresi kualitas laporan keuangan sebesar 0,388. Demikian tingkat signifikansinya adalah $0,000 < 0,05$ maka dapat diasumsikan hipotesis ini signifikan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa hipotesis pertama diterima atau didukung.

4.7 PEMBAHASAN

4.7.1 Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis pertama (H1) pada penelitian ini menguji kekayaan pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil nilai koefisien sebesar 0,122 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,048, nilai tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kekayaan pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama (H1) penelitian ini **diterima** atau **didukung**.

Pada hasil uji hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Indikator untuk mengevaluasi kekayaan pemerintah daerah adalah total pendapatan asli daerah, yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Besarnya kecilnya pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah menjadi ukuran untuk mengukur kekayaannya.

Berkaitannya dengan teori legitimasi, pemerintah daerah harus mempertahankan dan juga meningkatkan legitimasinya di mata publik. Hal ini pemerintah daerah saat melakukan kegiatan yang mempengaruhi pendapatan asli daerah harus sesuai dengan harapan yang dimiliki masyarakat, agar legitimasi pemerintah daerah dapat terus meningkat. Dengan besarnya meningkatnya legitimasi dalam pemerintah daerah ini membuat pemerintah daerah melakukan

transparansi informasi keuangan yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah, seperti pembuatan pengawasan independen untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan meningkatkan pengelolaan pajak dan retribusi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat kekayaan daerah yang tinggi dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya dan mampu memotivasi masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak, sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Kegiatan yang sesuai dengan harapan masyarakat akan mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kekayaan pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah.

Hasil pada penelitian ini selaras pada penelitian yang dilakukan Puspa dan Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian Uliarta et al (2018) dan Deka & Mia (2020) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengenai kekayaan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

4.7.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis kedua (H2) pada penelitian ini menguji ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil nilai koefisien sebesar -0.024 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar $0,825$, nilai tingkat signifikansinya lebih besar dari $0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua (H2) penelitian ini **ditolak** atau **tidak didukung**.

Berkaitan dengan teori institusional, pemerintah daerah menghadapi tekanan yang *coercive* yang terkait dengan ukuran aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap penggunaan aset tersebut. Penggunaan aset ini mencakup pengelolaan yang baik dan pemberian fasilitas kepada masyarakat, serta penyediaan informasi yang transparan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah.

Penyebab ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah yaitu semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar juga kompleksitas pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah yang besar tidak selalu mencerminkan ketersediaan kapasitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan praktik transparansi yang efektif. Aset yang dimiliki pemerintah daerah digunakan untuk keperluan lain

selain untuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi keuangan. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi keuangan yang baik seharusnya sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan transparansi informasi keuangan. Dalam pemerintah daerah yang memiliki aset besar belum tentu juga memiliki sistem pengelolaan keuangan yang memadai, kurang tenaga ahli yang memadai, atau infrastruktur yang diperlukan untuk melaksanakan praktik transparansi yang baik.

Selain itu, kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban internal pemerintah daerah juga dapat menjadi faktor penyebab. Tanpa pengawasan yang memadai, praktik transparansi informasi keuangan mungkin tidak dilaksanakan dengan baik, meskipun pemerintah daerah memiliki aset yang besar. Ini menekankan pentingnya memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan aset pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Adiputra et al (2018) dan Wilopo (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Dian et al (2018), Uliarta et al (2018), dan Deka & Mia (2020) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengenai ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

4.7.3 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis ketiga (H3) pada penelitian ini menguji kualitas laporan keuangan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil nilai koefisien sebesar 0,205 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,001, nilai tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga (H3) penelitian ini **diterima** atau **didukung**.

Sesuai teori tentang legitimasi, terdapat penekanan pada pentingnya mempertahankan citra positif pemerintah dan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam konteks kelangsungan organisasi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan membuat kualitas laporan keuangan yang baik agar dapat memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah melalui peningkatan kepercayaan dan transparansi dalam penyajian informasi keuangan. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat tercermin melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pentingnya opini audit dalam pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat tergambar dengan jelas. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan keuangan daerah untuk kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan. Semakin baik opini audit yang diperoleh, semakin tinggi tingkat

kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, dan dengan demikian, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Adiputra et al (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Wilopo (2017) dan Dian et al (2018) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengenai kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

4.7.4 Pengaruh *Maturity E-Government* terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

Hipotesis keempat (H4) pada penelitian ini menguji *maturity e-government* terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini mendapatkan hasil nilai koefisien sebesar 0,388 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,000, nilai tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *maturity e-government* berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis keempat (H4) penelitian ini **diterima** atau **didukung**.

Menurut teori institusional, tekanan *mimetic* menyatakan bahwa organisasi akan meniru praktik dan kebijakan yang diadopsi oleh organisasi sejenis yang dianggap berhasil. Pada konteks ini, pemerintah daerah merasa tertekan untuk meningkatkan transparansi informasi keuangan, karena mereka melihat bahwa pemerintah daerah lain telah berhasil meningkatkan transparansi melalui pengembangan *e-government*.

Tingkat transparansi informasi keuangan yang diungkapkan oleh pemerintah daerah akan meningkat sejalan dengan kemajuan mengenai *maturity e-government*. Sistem e-government yang matang dan teruji menjadi alat yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Dengan adanya website yang memiliki fitur yang baik, pemerintah dapat mempublikasikan semua aktivitas keuangan dan non-keuangan, dengan publikasi tersebut keterbukaan informasi akan semakin mudah diakses untuk siapa saja. Oleh karena itu, *maturity e-government* memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi pemerintah daerah.

Hasil penelitian yang serupa dilakukan oleh Putra et al (2018) dan Latif et al (2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitian mengenai *maturity e-government* berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hasil pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Nurindahsari et al (2022) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *maturity e-government* tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari penelitian dan analisis data yang telah dilakukan yang membahas mengenai pengaruh kekayaan pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan *maturity e-government* terhadap tingkat transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah berperan dalam mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya dengan mengungkapkan secara terbuka transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.
2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Artinya, besar kecilnya aset dalam suatu daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan aset atau fasilitas yang baik untuk menghasilkan transparansi keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Artinya, kualitas laporan keuangan yang semakin baik menurut opini audit BPK, akan menunjukkan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan dan

dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

4. *Maturity e-government* berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan *maturity e-Government* yang baik, pemerintah dapat dengan mudah melakukan transparansi informasi kepada masyarakat. Dengan kata lain, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang matang dalam pemerintahan daerah memungkinkan terwujudnya transparansi informasi keuangan pemerintah daerah yang lebih baik dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat.

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka terdapat implikasi yang disimpulkan, yaitu:

1. Bagi Masyarakat

Dengan menyediakan informasi ini, masyarakat dapat memahami faktor-faktor yang mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih transparan dalam menyampaikan informasi publik. Penelitian mengenai transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang mudah diakses dan dipahami mengenai pengelolaan keuangan publik, masyarakat dapat lebih aktif dalam memantau dan memberikan masukan terkait alokasi anggaran

dan prioritas pengeluaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya transparansi informasi publik, sehingga mempermudah masyarakat dalam mencari informasi yang mereka butuhkan.

2. Bagi Investor

Informasi keuangan pemerintah daerah yang transparan memberikan kepastian kepada investor tentang kondisi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pada situasi di mana informasi disampaikan dengan jelas, investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi di pemerintah daerah yang memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. Hal ini akan mendorong partisipasi investor dalam proyek-proyek pembangunan daerah seperti infrastruktur, energi terbarukan, atau sektor industri lainnya. Dengan adanya laporan pemerintah daerah yang berkualitas dan dukungan dari *maturity e-government* yang baik, membuat keputusan investasi para investor terhadap suatu daerah akan menjadi lebih mudah.

3. Bagi Pemerintah

Menurut penelitian ini, penting bagi pemerintah untuk mengelola pendapatan asli daerah dengan efektif guna meningkatkan transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah melalui pembuatan program-program pendukung. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan *maturity e-government* agar fiturnya menjadi lebih lengkap, sehingga tingkat transparansi dapat

tercapai dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui transparansi informasi keuangan. Ketika pemerintah daerah secara proaktif menyediakan informasi keuangan yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat, hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan spekulasi negatif.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin berdampak pada hasil analisis dan kesimpulan yang ingin dicapai. Di bawah ini disebutkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Hasil nilai pada *adjusted R²* penelitian ini sebesar 0,247 artinya transparansi informasi keuangan pemerintah daerah dipengaruhi faktor – faktor lain dalam penelitian ini sebesar 75,3%.
2. Salah satu keterbatasan yang kedua dalam penelitian ini adalah bahwa data yang digunakan salah satunya menggunakan data ordinal. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan data terpusat pada satu angka atau nilai tertentu, yang pada gilirannya menyebabkan ketidaknormalan distribusi data dalam penelitian ini dan harus menggunakan asumsi uji *Central Limit Theorem (CLT)*. Oleh karena itu, penelitian ini menghadapi kesulitan dalam mencapai distribusi data yang berdistribusi secara normal, karena keterbatasan struktural dari jenis data yang digunakan.

3. Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah adanya keterbatasan pada beberapa situs web pemerintah daerah yang tidak dapat diakses sewaktu waktu. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam memperoleh sejumlah data keuangan dan non-keuangan yang diperlukan. Dengan adanya situasi ini, proses pengumpulan data dapat menjadi lebih sulit dan memerlukan upaya tambahan untuk mencari sumber alternatif yang dapat digunakan.

5.4 SARAN

Menurut temuan dari penelitian tersebut, ada beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk penelitian yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar penelitian berikutnya dapat melibatkan variabel potensial independen tambahan, seperti belanja daerah, pendidikan kepala daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, dan ukuran legislatif. Penelitian tersebut dapat merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam menentukan variabel-variabel baru tersebut. Dengan demikian, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas dan variabel-variabel tersebut dapat dianalisis secara komprehensif.
2. Diharapkan bahwa penelitian selanjutnya tidak hanya fokus pada pengukuran transparansi pemerintah daerah pada provinsi, dan kabupaten/kota, tetapi juga lebih spesifik pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal ini penting karena masih terdapat kekurangan penelitian mengenai transparansi informasi keuangan di dalam SKPD dan OPD. Dengan adanya penelitian baru yang melibatkan aspek ini, diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan dalam tingkat kompleksitas transparansi di lingkungan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Aida, N. R. (2022). *Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin Divonis 4 Tahun Penjara, Ini Perjalanan Kasusnya*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/25/180000565/bupati-bogor-nonaktif-ade-yasin-divonis-4-tahun-penjara-ini-perjalanan?page=all>
- Bluman, A. G. (2012). *Elementary Statistic : A Step by Step Approach* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2018-3638>
- Deka, A. H., & Mia, A. S. (2020). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengungkapan Internet Budget Reporting (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.200>
- Dian, P. P., Verawaty, & Citra, I. M. (2018). *Faktor-Faktor Penentu Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui E- Government Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Selatan*. <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/3671>
- Dimaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In *Source: American Sociological Review* (Vol. 48, Issue 2).
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Pacific Sociological Association Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. In *Source: The Pacific Sociological Review* (Vol. 18, Issue 1).
- Fajaruddin. (2021). *Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1.
- Fietkiewicz, K. J., Mainka, A., & Stock, W. G. (2017). eGovernment in cities of the knowledge society. An empirical investigation of Smart Cities' governmental websites. *Government Information Quarterly*, 34(1), 75–83. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.003>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometric* (5th ed.). McGraw-

Hill/Irwin.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis* (7th ed.). Pearson Education Limited.

IMF. (2017). The IMF and Good Governance. *Factsheet*,
<https://www.imf.org/en/About/Factsheets/The-IMF-an>.
<http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm>

Istiqomah, N. (2018). Analisis Implementasi Government Finance Statistics di Indonesia: Pendekatan Teori Institusional. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90.
<https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>

Kerlinger, F. N., & Lee, H. B. (2000). *Foundations of Behavioral Research* (4th ed.). Wadsworth.

Kristanto B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA*, 9.

Latif, D. V., Saadah, & Arsalan, S. (2019). *Evaluasi Penerapan E Government Kota Bandung Ditinjau Dari Transparansi Dan Akuntabilitas*. 2(2), 24–31.
<https://bandung.go.id/>.

Lestari, R., & Nurkhin, A. (2023). Determinant Factors of Local Government Financial Performance (Using Financial Condition Dimension as Indicator). *Indonesian Management and Accounting Research*, 20(2), 335–360.
<https://doi.org/10.25105/imar.v20i2.13968>

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.

Mishra, S. K., & Tripathi, T. (2021). One year update on the COVID-19 pandemic: Where are we now? In *Acta Tropica* (Vol. 214). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105778>

Morissan. (2016). *Statistik Sosial*. Kharisma Putra Utama.

Nasution, A. P., & Atika, M. S. (2019). *Implementasi E-Budgeting Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai* (Vol. 9, Issue 2).

Nurindahsari, R., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). The Influence of Implementation E-Government Information System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management (Case Study on Bandung City Government) Rendra Trisyanto. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257.

Puspa, A., & Rahayu, S. (2021). *The Effect Of Regional Property, Administrative Age And Human Development Index On Disclosure Of Local Government Financial Information Through The Official Website Of The Regional Government (Case Study On Provincial Government in Indonesia in 2019)*.

5082.

- Puspitawati, L., Marisa Effendy, M., Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandung)*. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v9i1.4372>
- Putra, R., Ardhiarisca, O., Rina Wijayanti, R., Yudha Pratiwi, B., & Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember Jl Mastrip Kotak Pos, P. (2018). Evaluasi Perkembangan Dan Transparansi Laporan Keuangan E-Government Pemerintah Daerah Indonesia. *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi*.
- Ratmono, D., & Sagala, W. M. (2015). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Sarana Legitimasi: Dampaknya Terhadap Tingkat Agresivitas Pajak. *Jurnal Nominal*, IV, 16–30.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara* (pp. 1–41). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/31132/UU Nomor 17 Tahun 2003.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/31132/UU%20Nomor%2017%20Tahun%202003.pdf)
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (pp. 1–61). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30504/UU Nomor 32 Tahun 2004.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/30504/UU%20Nomor%2032%20Tahun%202004.pdf)
- Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah (PP) No 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah* (Issue 14, pp. 1–20). www.bphn.go.id
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* (pp. 1–18). [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28425/UU Nomor 14 Tahun 2008.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28425/UU%20Nomor%2014%20Tahun%202008.pdf)
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Scott, W. R. (2008). Approaching adulthood: The maturing of institutional theory. *Theory and Society*, 37(5), 427–442. <https://doi.org/10.1007/s11186-008-9067-z>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, Y., & Slamet, A. (2017). *Statistika Inferensial* (Giovanny (ed.); 1st ed.). ANDI.
- Tafakul, B., Rinofah, R., & Mujino. (2021). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, Net Profit Margin, Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-

2018. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 4(1), 11–19.
https://doi.org/10.26460/ed_en.v4i1.1766

Uliarta, H. A., Christophorus, S., & Kurniawan, H. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Sseluruh Provinsi Indonesia. *MODUS*, 30(1), 54–70.

Wilopo, I. A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Olah Data

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_KPD	541	9.69	13.62	11.6818	.60143
X2_UPD	541	11.90	14.74	12.5018	.32933
X3_KLK	541	1.00	4.00	3.9168	.33126
X4_MEG	541	1.00	4.00	2.1922	.55446
Y_TIK	541	1.00	3.00	1.9760	.53867
Valid N (listwise)	541				

Hasil Uji Normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		541
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.46584039
Most Extreme Differences	Absolute	.186
	Positive	.131
	Negative	-.186
Test Statistic		.186
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	X1_KPD	.289	3.464
	X2_UPD	.320	3.128
	X3_KLK	.944	1.060
	X4_MEG	.785	1.274

a. Dependent Variable: Y_TIK

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.152 ^a	.023	.006	.33248

a. Predictors: (Constant), X1X2X3X4, X3_KLK, X2_UPD, X1_KPD, X4_KUADRAT, X3_KUADRAT, X4_MEG, X1_KUADRAT, X2_KUADRAT

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.380	9	.153	1.387	.191 ^b
	Residual	58.698	531	.111		
	Total	60.078	540			

a. Dependent Variable: U2T

b. Predictors: (Constant), X1X2X3X4, X3_KLK, X2_UPD, X1_KPD, X4_KUADRAT, X3_KUADRAT, X4_MEG, X1_KUADRAT, X2_KUADRAT

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.741	.936		-.791	.429
	X1_KPD	.122	.062	.136	1.956	.048
	X2_UPD	-.024	.108	-.015	-.221	.825
	X3_KLK	.205	.063	.126	3.275	.001
	X4_MEG	.388	.041	.400	9.484	.000

a. Dependent Variable: Y_TIK

Hasil Uji Determinan Koefisien (Adj R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502 ^a	.252	.247	.46758

a. Predictors: (Constant), X4_MEG, X3_KLK, X2_UPD, X1_KPD

b. Dependent Variable: Y_TIK

Hasil Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.741	.936		-.791	.429
	X1_KPD	.122	.062	.136	1.956	.048
	X2_UPD	-.024	.108	-.015	-.221	.825
	X3_KLK	.205	.063	.126	3.275	.001
	X4_MEG	.388	.041	.400	9.484	.000

a. Dependent Variable: Y_TIK

Lampiran 2 Chi Square Table

DF	Chi-Square Right-Tail Probability ($\geq \chi^2$)									
	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	---	---	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

Lampiran 3 Daftar Pemerintah daerah dan Hasil Pengumpulan Data Variabel Dependen dan Independen

No	Nama Daerah	Tingkat	Kekayaan Pemerintah Daerah (X1)	Ukuran Pemerintah Daerah(X2)	Kualitas Laporan Keuangan (X3)	<i>Maturity E- Government</i> (X4)	Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (Y)
1	Aceh	Provinsi	12,399	13,503	4	3	2
2	Aceh Barat	Kabupaten	11,129	12,548	4	3	3
3	Aceh Barat Daya	Kabupaten	10,963	12,318	4	3	3
4	Aceh Besar	Kabupaten	11,227	12,496	4	2	3
5	Aceh Jaya	Kabupaten	10,878	12,407	4	2	2
6	Aceh Selatan	Kabupaten	11,121	12,488	4	2	2
7	Aceh Singkil	Kabupaten	10,723	12,188	4	1	1
8	Aceh Tamiang	Kabupaten	11,142	12,432	4	2	2
9	Aceh Tengah	Kabupaten	11,218	12,435	4	2	2
10	Aceh Tenggara	Kabupaten	10,911	12,538	4	2	2
11	Aceh Timur	Kabupaten	11,088	12,531	4	2	2
12	Aceh Utara	Kabupaten	11,253	12,692	4	2	2
13	Bener Meriah	Kabupaten	10,799	12,233	4	2	2
14	Bireuen	Kabupaten	11,239	12,545	4	2	2
15	Gayo Lues	Kabupaten	10,804	12,304	4	2	2

16	Nagan Raya	Kabupaten	10,993	12,347	4	2	2
17	Pidie	Kabupaten	11,350	12,594	4	2	2
18	Pidie Jaya	Kabupaten	10,916	12,259	4	2	2
19	Simeulue	Kabupaten	11,105	12,218	4	2	2
20	Banda Aceh	Kota	11,351	12,674	4	2	2
21	Langsa	Kota	11,038	12,296	4	3	3
22	Lhokseumawe	Kota	10,792	12,322	4	2	2
23	Sabang	Kota	10,792	12,166	4	3	2
24	Subulussalam	Kota	10,763	12,168	4	1	1
25	Sumatera Utara	Provinsi	12,806	13,275	4	2	2
26	Asahan	Kabupaten	11,130	12,561	4	2	1
27	Batu Bara	Kabupaten	11,242	12,334	4	3	2
28	Dairi	Kabupaten	10,859	12,298	4	2	2
29	Deli Serdang	Kabupaten	11,967	12,901	4	2	1
30	Humbang Hasundutan	Kabupaten	10,893	12,313	4	2	2
31	Karo	Kabupaten	11,035	12,421	4	2	2
32	Labuhan Batu	Kabupaten	11,377	12,441	3	2	2
33	Labuhanbatu Selatan	Kabupaten	10,801	12,236	4	2	2
34	Labuhanbatu Utara	Kabupaten	10,770	12,219	4	2	2
35	Langkat	Kabupaten	11,200	12,619	3	2	2
36	Mandailing Natal	Kabupaten	11,154	12,316	3	2	2
37	Nias	Kabupaten	11,017	12,269	4	1	1
38	Nias Barat	Kabupaten	10,262	12,082	4	1	1
39	Nias Selatan	Kabupaten	10,516	12,335	3	2	1

40	Nias Utara	Kabupaten	10,305	12,232	3	2	1
41	Padang Lawas	Kabupaten	10,670	12,225	4	1	1
42	Padang Lawas Utara	Kabupaten	10,637	12,156	3	2	1
43	Pakpak Bharat	Kabupaten	10,388	12,003	4	2	1
44	Samosir	Kabupaten	10,791	12,230	4	2	1
45	Serdang Bedagai	Kabupaten	11,125	12,368	4	2	2
46	Simalungun	Kabupaten	11,250	12,549	3	2	1
47	Tapanuli Selatan	Kabupaten	11,127	12,465	4	2	2
48	Tapanuli Tengah	Kabupaten	10,927	12,279	4	2	1
49	Tapanuli Utara	Kabupaten	11,212	12,425	4	2	2
50	Toba Samosir	Kabupaten	10,877	12,298	4	2	2
51	Binjai	Kota	10,964	12,126	4	2	2
52	Gunung Sitoli	Kota	10,185	12,227	4	2	2
53	Medan	Kota	12,280	13,539	4	3	1
54	Padang Sidempuan	Kota	10,777	12,147	4	2	1
55	Pematang Siantar	Kota	11,109	12,541	4	1	1
56	Sibolga	Kota	10,882	12,211	4	2	2
57	Tanjungbalai	Kota	10,768	12,149	3	2	2
58	Tebing Tinggi	Kota	10,919	12,290	4	2	2
59	Sumatera Barat	Provinsi	12,407	13,053	4	2	1
60	Agam	Kabupaten	10,908	12,316	4	2	1
61	Dharmasraya	Kabupaten	10,918	12,399	4	2	2
62	Kepulauan Mentawai	Kabupaten	10,500	12,299	3	2	2
63	Lima Puluh Kota	Kabupaten	10,902	12,247	4	2	2

64	Padang Pariaman	Kabupaten	11,068	12,062	4	2	2
65	Pasaman	Kabupaten	10,951	12,286	4	2	1
66	Pasaman Barat	Kabupaten	11,137	12,399	4	2	1
67	Pesisir Selatan	Kabupaten	11,161	12,423	4	2	2
68	Sijunjung	Kabupaten	10,963	12,286	4	2	1
69	Solok	Kabupaten	10,880	12,248	4	2	2
70	Solok Selatan	Kabupaten	10,906	12,241	4	2	2
71	Tanah Datar	Kabupaten	11,084	12,119	4	2	1
72	Bukittinggi	Kota	10,963	12,312	4	3	2
73	Padang	Kota	11,732	12,893	4	3	3
74	Padang Panjang	Kota	10,969	12,111	4	2	2
75	Pariaman	Kota	10,580	11,899	4	2	2
76	Payakumbuh	Kota	11,831	12,157	4	2	3
77	Sawahlunto	Kota	10,712	11,997	4	2	2
78	Solok	Kota	10,627	12,181	4	2	2
79	Riau	Provinsi	12,608	13,514	4	2	1
80	Bengkalis	Kabupaten	11,454	12,971	4	2	2
81	Indragiri Hilir	Kabupaten	11,355	12,589	4	2	2
82	Indragiri Hulu	Kabupaten	11,090	12,443	4	2	2
83	Kampar	Kabupaten	11,428	12,649	4	2	2
84	Kepulauan Meranti	Kabupaten	10,985	12,439	4	2	2
85	Kuantan Singingi	Kabupaten	10,979	12,440	4	2	2
86	Pelalawan	Kabupaten	11,202	12,614	4	2	2
87	Rokan Hilir	Kabupaten	11,134	12,758	4	2	1

88	Rokan Hulu	Kabupaten	11,206	12,505	4	3	3
89	Siak	Kabupaten	11,491	12,784	4	3	3
90	Dumai	Kota	11,564	12,490	4	2	2
91	Pekanbaru	Kota	11,835	12,893	4	3	3
92	Jambi	Provinsi	12,266	12,979	4	3	2
93	Batang Hari	Kabupaten	11,172	12,301	4	2	2
94	Bungo	Kabupaten	11,298	12,242	4	2	2
95	Kerinci	Kabupaten	10,825	12,203	4	3	3
96	Merangin	Kabupaten	11,033	12,399	4	2	2
97	Muaro Jambi	Kabupaten	11,044	12,421	4	3	2
98	Sarolangun	Kabupaten	10,803	12,404	4	2	2
99	Tanjung Jabung Barat	Kabupaten	11,074	12,692	4	2	2
100	Tanjung Jabung Timur	Kabupaten	10,912	12,352	4	2	3
101	Tebo	Kabupaten	10,955	12,401	4	2	2
102	Jambi	Kota	11,585	12,634	4	3	2
103	Sungai Penuh	Kota	10,772	12,210	4	2	3
104	Sumatera Selatan	Provinsi	12,587	13,523	4	3	2
105	Banyuasin	Kabupaten	11,359	12,683	4	3	2
106	Empat Lawang	Kabupaten	10,445	12,382	4	3	2
107	Lahat	Kabupaten	11,191	12,521	4	3	3
108	Muara Enim	Kabupaten	11,381	12,842	4	3	3
109	Musi Banyuasin	Kabupaten	11,577	12,895	3	2	2
110	Musi Rawas	Kabupaten	11,230	12,619	4	3	3
111	Musi Rawas Utara	Kabupaten	10,681	12,356	4	2	2

112	Ogan Ilir	Kabupaten	11,037	12,425	4	3	3
113	OKI	Kabupaten	11,195	12,643	4	2	2
114	OKU	Kabupaten	11,012	12,516	4	3	3
115	OKU Selatan	Kabupaten	10,784	12,475	4	3	2
116	OKU Timur	Kabupaten	11,095	12,486	4	3	2
117	Penukal Abab Lematang Ilir	Kabupaten	10,832	12,492	4	3	2
118	Lubuklinggau	Kota	11,108	12,504	4	3	2
119	Pagar Alam	Kota	10,755	12,374	4	2	2
120	Palembang	Kota	12,064	13,221	4	3	3
121	Prabumulih	Kota	10,608	12,431	4	3	3
122	Bengkulu	Provinsi	11,993	12,820	4	3	2
123	Bengkulu Selatan	Kabupaten	10,860	12,145	4	3	2
124	Bengkulu Tengah	Kabupaten	10,369	12,171	4	2	1
125	Bengkulu Utara	Kabupaten	11,011	12,271	4	2	1
126	Kaur	Kabupaten	10,642	12,131	4	2	3
127	Kepahiang	Kabupaten	10,539	12,132	4	2	2
128	Lebong	Kabupaten	10,229	12,233	4	2	1
129	Mukomuko	Kabupaten	10,744	12,245	4	2	2
130	Rejang Lebong	Kabupaten	10,844	12,188	4	2	2
131	Seluma	Kabupaten	10,559	12,240	3	2	1
132	Bengkulu	Kota	11,244	12,309	4	2	3
133	Lampung	Provinsi	12,512	13,073	4	2	2
134	Lampung Barat	Kabupaten	10,854	12,423	4	2	3
135	Lampung Selatan	Kabupaten	11,471	12,520	4	2	3

136	Lampung Tengah	Kabupaten	11,371	12,595	4	2	3
137	Lampung Timur	Kabupaten	11,200	12,317	4	2	2
138	Lampung Utara	Kabupaten	11,018	12,355	3	2	1
139	Mesuji	Kabupaten	10,756	12,308	4	2	1
140	Pesawaran	Kabupaten	10,912	12,360	4	2	2
141	Pesisir Barat	Kabupaten	10,453	12,236	4	2	1
142	Pringsewu	Kabupaten	11,056	12,336	4	2	2
143	Tanggamus	Kabupaten	10,981	12,380	4	2	2
144	Tulang Bawang	Kabupaten	11,028	12,287	4	2	1
145	Tulang Bawang Barat (Tubaba)	Kabupaten	10,668	12,283	4	2	2
146	Way Kanan	Kabupaten	10,846	12,411	4	2	1
147	Bandar Lampung	Kota	11,752	12,748	3	3	3
148	Metro	Kota	11,438	12,439	4	3	3
149	Bangka Belitung	Provinsi	11,952	12,703	4	3	3
150	Bangka	Kabupaten	11,187	12,327	4	3	3
151	Bangka Barat	Kabupaten	10,776	12,150	4	3	2
152	Bangka Selatan	Kabupaten	10,802	12,245	4	3	2
153	Bangka Tengah	Kabupaten	10,921	12,197	4	3	3
154	Belitung	Kabupaten	11,269	12,363	4	3	1
155	Belitung Timur	Kabupaten	11,065	12,208	4	2	2
156	Pangkal Pinang	Kota	11,228	12,512	4	2	2
157	Kep Riau	Provinsi	12,139	12,822	4	2	1
158	Bintan	Kabupaten	11,292	12,384	4	2	2
159	Karimun	Kabupaten	11,657	12,359	4	2	2

160	Kepulauan Anambas	Kabupaten	10,523	12,295	4	1	1
161	Lingga	Kabupaten	10,791	12,273	4	2	1
162	Natuna	Kabupaten	10,630	12,447	4	2	1
163	Batam	Kota	12,039	12,904	4	1	2
164	Tanjungpinang	Kota	11,132	12,295	4	2	1
165	Prov DKI Jakarta	Provinsi	13,619	14,736	4	4	3
166	Prov Jawa Barat	Provinsi	13,308	13,623	4	3	2
167	Bandung	Kabupaten	12,040	13,091	4	2	2
168	Bandung Barat	Kabupaten	11,733	12,607	4	2	2
169	Bekasi	Kabupaten	12,406	13,145	4	3	3
170	Bogor	Kabupaten	12,575	13,443	3	2	2
171	Ciamis	Kabupaten	11,437	12,595	4	2	2
172	Cianjur	Kabupaten	11,899	12,820	4	2	2
173	Cirebon	Kabupaten	11,833	12,688	4	2	2
174	Garut	Kabupaten	11,749	12,683	4	2	2
175	Indramayu	Kabupaten	11,724	12,784	4	2	2
176	Karawang	Kabupaten	12,218	12,799	4	2	2
177	Kuningan	Kabupaten	11,536	12,447	4	2	2
178	Majalengka	Kabupaten	11,669	12,744	4	2	2
179	Pangandaran	Kabupaten	11,243	12,403	4	2	2
180	Purwakarta	Kabupaten	11,712	12,465	4	3	3
181	Subang	Kabupaten	11,694	12,676	4	3	2
182	Sukabumi	Kabupaten	11,830	12,722	4	3	2
183	Sumedang	Kabupaten	11,672	12,548	4	2	2

184	Tasikmalaya	Kabupaten	11,574	12,673	4	2	2
185	Bandung	Kota	12,342	13,641	4	3	2
186	Banjar	Kota	11,104	12,203	4	3	2
187	Bekasi	Kota	12,404	13,181	3	3	2
188	Bogor	Kota	12,032	12,996	4	3	2
189	Cimahi	Kota	11,608	12,468	4	2	2
190	Cirebon	Kota	11,603	12,592	4	3	2
191	Depok	Kota	12,187	13,199	4	3	2
192	Sukabumi	Kota	11,537	12,252	4	3	2
193	Tasikmalaya	Kota	11,649	12,584	4	2	2
194	Prov Jawa Tengah	Provinsi	13,167	13,594	4	3	3
195	Banjarnegara	Kabupaten	11,497	12,664	4	2	2
196	Banyumas	Kabupaten	11,882	12,861	4	2	3
197	Batang	Kabupaten	11,509	12,482	4	2	2
198	Blora	Kabupaten	11,514	12,549	4	2	1
199	Boyolali	Kabupaten	11,712	12,668	4	2	2
200	Brebes	Kabupaten	11,715	12,584	4	2	2
201	Cilacap	Kabupaten	11,869	12,802	4	3	2
202	Demak	Kabupaten	11,648	12,772	4	2	2
203	Grobogan	Kabupaten	11,628	12,576	4	2	2
204	Jepara	Kabupaten	11,611	12,824	4	2	2
205	Karanganyar	Kabupaten	11,630	12,689	4	2	2
206	Kebumen	Kabupaten	11,674	12,670	4	2	2
207	Kendal	Kabupaten	11,643	12,561	4	2	2

208	Klaten	Kabupaten	11,499	12,546	4	2	2
209	Kudus	Kabupaten	11,705	12,686	4	2	2
210	Magelang	Kabupaten	11,574	12,556	4	2	2
211	Pati	Kabupaten	11,590	12,803	4	3	3
212	Pekalongan	Kabupaten	11,540	12,497	4	2	2
213	Pemalang	Kabupaten	11,563	12,590	4	3	3
214	Purbalingga	Kabupaten	11,577	12,456	4	2	2
215	Purworejo	Kabupaten	11,642	12,519	4	3	3
216	Rembang	Kabupaten	11,606	12,399	4	3	3
217	Semarang	Kabupaten	11,760	12,724	4	2	2
218	Sragen	Kabupaten	11,730	12,626	4	2	2
219	Sukoharjo	Kabupaten	11,723	12,799	4	2	2
220	Tegal	Kabupaten	11,772	12,626	4	2	2
221	Temanggung	Kabupaten	11,560	12,534	4	2	2
222	Wonogiri	Kabupaten	11,383	12,592	4	2	2
223	Wonosobo	Kabupaten	11,531	12,575	4	2	2
224	Magelang	Kota	11,504	12,637	4	3	3
225	Pekalongan	Kota	11,401	12,484	4	2	2
226	Salatiga	Kota	11,448	12,505	4	2	2
227	Semarang	Kota	12,378	13,333	4	3	3
228	Surakarta	Kota	12,288	13,104	4	3	3
229	Tegal	Kota	11,489	12,390	4	2	2
230	Prov DI Yogyakarta	Provinsi	12,279	13,079	4	4	3
231	Bantul	Kabupaten	11,692	12,537	4	3	2

232	Gunungkidul	Kabupaten	11,374	12,521	4	3	2
233	Kulonprogo	Kabupaten	11,487	12,398	4	3	2
234	Sleman	Kabupaten	11,905	12,765	4	3	3
235	Yogyakarta	Kota	11,777	12,674	4	3	3
236	Prov Jawa Timur	Provinsi	13,277	13,640	4	3	3
237	Bangkalán	Kabupaten	11,434	12,517	4	2	2
238	Banyuwangi	Kabupaten	11,716	12,688	4	2	1
239	Blitar	Kabupaten	11,610	12,681	4	2	2
240	Bojonegoro	Kabupaten	11,980	13,172	4	3	3
241	Bondowoso	Kabupaten	11,349	12,461	4	2	2
242	Gresik	Kabupaten	12,013	12,792	4	3	2
243	Jember	Kabupaten	11,322	12,734	3	2	2
244	Jombang	Kabupaten	11,823	12,621	4	2	2
245	Kediri	Kabupaten	11,711	12,725	4	2	2
246	Lamongan	Kabupaten	11,806	12,755	4	3	2
247	Lumajang	Kabupaten	11,512	12,445	4	2	2
248	Madiun	Kabupaten	11,523	12,666	4	2	2
249	Magetan	Kabupaten	11,387	12,392	4	3	2
250	Malang	Kabupaten	11,826	12,792	4	3	3
251	Mojokerto	Kabupaten	11,796	12,796	4	2	2
252	Nganjuk	Kabupaten	11,680	12,582	4	2	2
253	Ngawi	Kabupaten	11,453	12,625	4	3	2
254	Pacitan	Kabupaten	11,326	12,345	4	2	2
255	Pamekasan	Kabupaten	11,314	12,577	4	2	2

256	Pasuruan	Kabupaten	11,846	12,639	4	2	2
257	Ponorogo	Kabupaten	11,576	12,421	4	2	2
258	Probolinggo	Kabupaten	11,478	12,493	4	2	2
259	Sampang	Kabupaten	11,132	12,610	4	2	2
260	Sidoarjo	Kabupaten	12,284	13,339	4	3	3
261	Situbondo	Kabupaten	11,359	12,650	4	2	2
262	Sumenep	Kabupaten	11,403	12,562	4	2	2
263	Trenggalek	Kabupaten	11,368	12,425	4	2	2
264	Tuban	Kabupaten	11,789	12,885	4	2	2
265	Tulungagung	Kabupaten	11,979	12,655	4	2	2
266	Batu	Kota	11,171	12,292	4	2	2
267	Blitar	Kota	11,474	12,454	4	2	2
268	Kediri	Kota	11,643	12,523	4	2	2
269	Madiun	Kota	11,425	12,451	4	3	2
270	Malang	Kota	11,781	12,913	4	3	3
271	Mojokerto	Kota	11,409	12,309	4	3	2
272	Pasuruan	Kota	11,120	12,506	4	3	2
273	Probolinggo	Kota	11,328	12,271	4	3	2
274	Surabaya	Kota	12,675	13,672	4	3	3
275	Prov Banten	Provinsi	12,846	13,291	4	3	3
276	Lebak	Kabupaten	11,292	12,664	4	2	2
277	Pandeglang	Kabupaten	11,840	12,520	4	2	2
278	Serang	Kabupaten	12,458	12,648	4	2	2
279	Tangerang	Kabupaten	11,800	13,248	4	2	2

280	Cilegon	Kota	11,800	12,711	4	2	2
281	Serang	Kota	11,314	12,526	4	3	2
282	Tangerang	Kota	12,272	13,193	4	3	2
283	Tangerang Selatan	Kota	12,234	13,384	4	3	2
284	Prov Bali	Provinsi	12,494	13,077	4	3	3
285	Badung	Kabupaten	12,243	13,232	4	3	3
286	Bangli	Kabupaten	11,214	12,142	4	3	2
287	Buleleng	Kabupaten	11,593	12,472	4	3	2
288	Gianyar	Kabupaten	11,634	12,495	4	2	3
289	Jembrana	Kabupaten	11,267	12,349	4	3	2
290	Karangasem	Kabupaten	11,403	12,201	4	3	3
291	Klungkung	Kabupaten	11,406	12,078	4	3	2
292	Tabanan	Kabupaten	11,559	12,414	4	3	3
293	Denpasar	Kota	11,899	12,815	4	3	2
294	Prov Nusa Tenggara Barat	Provinsi	12,276	13,123	4	2	3
295	Bima	Kabupaten	11,151	12,465	4	2	2
296	Dompu	Kabupaten	11,100	12,238	4	1	1
297	Lombok Barat	Kabupaten	11,470	12,467	4	3	2
298	Lombok Tengah	Kabupaten	11,212	12,551	4	3	2
299	Lombok Timur	Kabupaten	11,588	12,591	4	2	2
300	Lombok Utara	Kabupaten	10,941	12,276	4	2	1
301	Sumbawa	Kabupaten	11,307	12,515	4	2	2
302	Sumbawa Barat	Kabupaten	11,152	12,346	4	2	1
303	Bima	Kota	10,672	12,290	4	2	2

304	Mataram	Kota	11,560	12,544	4	3	2
305	Prov Nusa Tenggara Timur	Provinsi	12,067	13,036	4	3	3
306	Alor	Kabupaten	10,703	12,386	4	1	1
307	Belu	Kabupaten	10,858	12,206	4	2	2
308	Ende	Kabupaten	10,828	12,177	4	2	1
309	Flores Timur	Kabupaten	10,770	12,114	4	2	1
310	Kupang	Kabupaten	10,871	12,362	3	2	1
311	Lembata	Kabupaten	10,581	12,187	4	2	2
312	Malaka	Kabupaten	10,743	12,157	4	2	2
313	Manggarai	Kabupaten	10,991	12,355	4	2	2
314	Manggarai Barat	Kabupaten	11,190	12,345	4	2	2
315	Manggarai Timur	Kabupaten	10,645	12,268	4	2	2
316	Nagekeo	Kabupaten	10,522	12,274	4	2	2
317	Ngada	Kabupaten	10,643	12,236	4	2	2
318	Rote Ndao	Kabupaten	10,498	12,210	4	2	2
319	Sabu Raijua	Kabupaten	10,452	12,148	4	1	2
320	Sikka	Kabupaten	10,958	12,275	4	2	2
321	Sumba Barat	Kabupaten	10,750	12,125	4	2	2
322	Sumba Barat Daya	Kabupaten	10,643	12,268	4	2	2
323	Sumba Tengah	Kabupaten	10,439	12,094	4	1	1
324	Sumba Timur	Kabupaten	11,108	12,382	4	2	2
325	Timor Tengah Selatan	Kabupaten	10,839	12,313	4	2	2
326	Timor Tengah Utara	Kabupaten	10,826	12,223	4	1	2
327	Kupang	Kota	11,221	12,444	4	3	3

328	Prov Kalimantan Barat	Provinsi	12,327	13,127	4	3	2
329	Bengkayang	Kabupaten	10,798	12,305	3	2	2
330	Kapuas Hulu	Kabupaten	10,896	12,546	4	2	2
331	Kayong Utara	Kabupaten	10,537	12,237	4	2	3
332	Ketapang	Kabupaten	11,464	12,756	4	3	2
333	Kubu Raya	Kabupaten	11,207	12,358	4	2	3
334	Landak	Kabupaten	10,991	12,495	4	2	2
335	Melawi	Kabupaten	10,750	12,388	4	2	3
336	Mempawah	Kabupaten	10,983	12,167	4	3	2
337	Sambas	Kabupaten	11,171	12,472	4	2	3
338	Sanggau	Kabupaten	11,113	12,513	4	2	2
339	Sekadau	Kabupaten	10,655	12,329	4	2	2
340	Sintang	Kabupaten	11,247	12,645	4	2	2
341	Pontianak	Kota	11,616	12,968	4	3	3
342	Singkawang	Kota	11,244	12,379	4	3	3
343	Prov Kalimantan Tengah	Provinsi	12,268	13,108	4	2	2
344	Barito Selatan	Kabupaten	10,990	12,312	4	2	1
345	Barito Timur	Kabupaten	10,993	12,163	4	2	2
346	Barito Utara	Kabupaten	11,017	12,524	4	2	2
347	Gunung Mas	Kabupaten	10,930	12,303	4	2	2
348	Kapuas	Kabupaten	11,172	12,582	4	3	2
349	Katingan	Kabupaten	10,826	12,462	4	3	2
350	Kotawaringin Barat	Kabupaten	11,593	12,530	4	3	2
351	Kotawaringin Timur	Kabupaten	11,515	12,587	4	2	2

352	Lamandau	Kabupaten	10,978	12,275	4	2	2
353	Murung Raya	Kabupaten	11,045	12,477	4	2	1
354	Pulang Pisau	Kabupaten	11,098	12,331	4	2	2
355	Seruyan	Kabupaten	10,919	12,525	4	2	1
356	Sukamara	Kabupaten	10,746	12,396	4	2	1
357	Palangkaraya	Kota	11,461	12,590	4	3	2
358	Prov Kalimantan Selatan	Provinsi	12,552	13,276	4	2	2
359	Balangan	Kabupaten	11,116	12,412	4	3	2
360	Banjar	Kabupaten	11,337	12,551	4	3	2
361	Barito Kuala	Kabupaten	11,036	12,372	4	2	2
362	Hulu Sungai Selatan	Kabupaten	11,394	12,548	4	3	2
363	Hulu Sungai Tengah	Kabupaten	11,095	12,326	4	3	2
364	Hulu Sungai Utara	Kabupaten	11,092	12,426	4	3	2
365	Kotabaru	Kabupaten	11,309	12,675	4	2	1
366	Tabalong	Kabupaten	11,269	12,612	4	2	2
367	Tanah Bumbu	Kabupaten	11,199	12,587	4	2	1
368	Tanah Laut	Kabupaten	11,314	12,634	4	2	1
369	Tapin	Kabupaten	10,887	12,384	4	2	2
370	Banjar Baru	Kota	11,506	12,487	4	2	2
371	Banjarmasin	Kota	11,547	12,759	4	3	2
372	Prov Kalimantan Timur	Provinsi	12,786	13,525	4	3	2
373	Berau	Kabupaten	11,432	12,949	4	2	2
374	Kutai Barat	Kabupaten	11,154	12,785	4	2	2
375	Kutai Kartanegara	Kabupaten	11,850	13,223	4	2	2

376	Kutai Timur	Kabupaten	11,403	13,001	4	3	2
377	Mahakam Ulu	Kabupaten	10,521	12,402	4	2	2
378	Paser	Kabupaten	11,432	12,845	4	2	2
379	Penajam Paser Utara	Kabupaten	10,944	12,662	4	2	2
380	Balikpapan	Kota	11,878	13,094	4	3	3
381	Bontang	Kota	11,391	12,672	4	3	3
382	Samarinda	Kota	11,759	13,301	4	3	3
383	Prov Kalimantan Utara	Provinsi	11,831	12,877	4	3	3
384	Bulungan	Kabupaten	11,221	12,741	4	3	2
385	Malinau	Kabupaten	10,874	12,667	4	2	2
386	Nunukan	Kabupaten	11,246	12,665	4	2	2
387	Tana Tidung	Kabupaten	10,298	12,481	4	2	1
388	Tarakan	Kota	11,177	12,777	4	3	2
389	Prov Sulawesi Utara	Provinsi	12,117	13,025	4	2	1
390	Bolaang Mongondow	Kabupaten	10,781	12,251	4	1	2
391	Bolaang Mongondow Selatan	Kabupaten	10,112	12,080	4	1	1
392	Bolaang Mongondow Timur	Kabupaten	10,126	11,973	4	1	2
393	Bolaang Mongondow Utara	Kabupaten	10,315	12,120	4	2	2
394	Kepulauan Sangihe	Kabupaten	10,911	12,244	4	1	2
395	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kabupaten	10,480	12,136	4	2	2
396	Kepulauan Talaud	Kabupaten	10,571	12,172	4	1	1
397	Minahasa	Kabupaten	10,975	12,321	4	1	1
398	Minahasa Selatan	Kabupaten	10,464	12,235	4	2	2
399	Minahasa Tenggara	Kabupaten	10,214	12,171	4	2	1

400	Minahasa Utara	Kabupaten	11,015	12,248	4	1	2
401	Bitung	Kota	10,856	12,310	4	2	2
402	Kotamobagu	Kota	10,961	12,089	4	2	2
403	Manado	Kota	11,442	12,671	4	3	2
404	Tomohon	Kota	10,406	12,255	4	2	2
405	Prov Sulawesi Tengah	Provinsi	12,174	12,855	4	3	2
406	Banggai	Kabupaten	11,280	12,418	4	2	2
407	Banggai Kepulauan	Kabupaten	10,527	12,553	3	2	2
408	Banggai Laut	Kabupaten	10,346	12,080	4	2	2
409	Buol	Kabupaten	10,751	12,323	4	2	2
410	Donggala	Kabupaten	10,807	12,373	3	3	2
411	Morowali	Kabupaten	11,535	12,419	4	2	2
412	Morowali Utara	Kabupaten	11,017	12,277	4	2	2
413	Parigi Moutong	Kabupaten	11,092	12,419	4	2	2
414	Poso	Kabupaten	11,048	12,370	4	2	2
415	Sigi	Kabupaten	10,896	12,277	4	2	2
416	Tojo Una-Una	Kabupaten	10,966	12,317	4	2	2
417	Tolitoli	Kabupaten	11,129	12,345	4	2	2
418	Palu	Kota	11,534	12,485	4	3	2
419	Prov Sulawesi Selatan	Provinsi	12,652	13,320	4	3	2
420	Bantaeng	Kabupaten	11,085	12,357	4	2	2
421	Barru	Kabupaten	10,959	12,354	4	3	2
422	Bone	Kabupaten	11,249	12,499	4	2	2
423	Bulukumba	Kabupaten	11,185	12,428	4	3	2

424	Enrekang	Kabupaten	10,865	12,345	4	2	2
425	Gowa	Kabupaten	11,416	12,629	4	2	2
426	Jeneponto	Kabupaten	10,996	12,376	3	2	2
427	Kepulauan Selayar	Kabupaten	10,740	12,324	4	2	2
428	Luwu	Kabupaten	11,122	12,421	4	2	2
429	Luwu Timur	Kabupaten	11,486	12,522	4	2	2
430	Luwu Utara	Kabupaten	11,087	12,221	4	3	2
431	Maros	Kabupaten	11,345	12,524	4	2	2
432	Pangkajene dan Kepulauan	Kabupaten	11,203	12,300	4	3	2
433	Pinrang	Kabupaten	11,127	12,485	4	2	2
434	Sidenreng Rappang	Kabupaten	11,136	12,411	4	2	2
435	Sinjai	Kabupaten	10,980	12,377	4	2	2
436	Soppeng	Kabupaten	11,192	12,383	4	2	2
437	Takalar	Kabupaten	11,086	12,181	4	2	2
438	Tana Toraja	Kabupaten	11,018	12,544	3	2	2
439	Toraja Utara	Kabupaten	10,988	12,958	4	2	2
440	Wajo	Kabupaten	11,176	12,529	4	2	2
441	Makassar	Kota	12,057	13,482	4	3	3
442	Palopo	Kota	11,147	12,389	4	2	2
443	Parepare	Kota	11,212	12,352	4	3	2
444	Prov Sulawesi Tenggara	Provinsi	12,138	13,122	4	3	1
445	Bombana	Kabupaten	10,770	12,317	4	2	2
446	Buton	Kabupaten	10,573	12,301	4	2	2
447	Buton Selatan	Kabupaten	10,334	12,142	3	2	2

448	Buton Tengah	Kabupaten	10,263	12,303	4	2	2
449	Buton Utara	Kabupaten	10,356	12,184	4	2	2
450	Kolaka	Kabupaten	11,089	12,410	4	2	2
451	Kolaka Timur	Kabupaten	10,414	12,151	4	2	2
452	Kolaka Utara	Kabupaten	10,818	12,308	4	2	2
453	Konawe	Kabupaten	11,127	12,393	4	2	2
454	Konawe Kepulauan	Kabupaten	10,070	12,068	4	2	2
455	Konawe Selatan	Kabupaten	10,919	12,365	3	2	2
456	Konawe Utara	Kabupaten	10,550	12,233	4	2	2
457	Muna	Kabupaten	10,887	12,434	4	2	2
458	Muna Barat	Kabupaten	10,233	12,093	4	2	2
459	Wakatobi	Kabupaten	10,638	12,294	4	2	2
460	Baubau	Kota	10,980	12,405	4	2	2
461	Kendari	Kota	11,474	12,755	4	2	2
462	Prov Gorontalo	Provinsi	11,708	12,405	4	3	3
463	Boalemo	Kabupaten	10,738	12,181	4	2	2
464	Bone Bolango	Kabupaten	10,957	12,191	4	2	2
465	Gorontalo	Kabupaten	11,088	12,288	4	2	2
466	Gorontalo Utara	Kabupaten	10,442	12,047	4	2	2
467	Pohuwatu	Kabupaten	10,857	12,168	4	2	2
468	Gorontalo	Kota	11,473	12,207	4	2	2
469	Prov Sulawesi Barat	Provinsi	11,611	12,498	4	3	2
470	Majene	Kabupaten	10,930	12,207	4	2	2
471	Mamasa	Kabupaten	10,221	12,180	4	2	2

472	Mamuju	Kabupaten	10,768	12,346	4	2	2
473	Mamuju Tengah	Kabupaten	10,529	12,117	4	2	2
474	Pasangkayu	Kabupaten	10,615	12,331	4	2	2
475	Polewali Mandar	Kabupaten	11,416	12,384	4	2	2
476	Prov Maluku	Provinsi	11,741	12,814	4	3	3
477	Buru	Kabupaten	10,543	12,103	4	1	1
478	Buru Selatan	Kabupaten	10,336	12,248	3	3	1
479	Kepulauan Aru	Kabupaten	10,627	12,198	3	1	2
480	Kepulauan Tanibar	Kabupaten	10,568	12,317	4	2	2
481	Maluku Barat Daya	Kabupaten	10,606	12,245	4	2	2
482	Maluku Tengah	Kabupaten	10,955	12,456	4	2	2
483	Maluku Tenggara	Kabupaten	10,653	12,204	4	2	2
484	Seram Bagian Barat	Kabupaten	10,580	12,165	1	2	1
485	Seram Bagian Timur	Kabupaten	10,538	12,285	3	2	1
486	Ambon	Kota	11,186	12,229	1	3	2
487	Tual	Kota	10,391	12,189	4	2	2
488	Prov Maluku Utara	Provinsi	11,742	12,760	4	3	1
489	Halmahera Barat	Kabupaten	10,605	12,143	4	2	2
490	Halmahera Selatan	Kabupaten	10,932	12,361	4	2	2
491	Halmahera Tengah	Kabupaten	10,919	12,436	4	2	2
492	Halmahera Timur	Kabupaten	10,769	12,407	4	2	2
493	Halmahera Utara	Kabupaten	10,991	12,254	4	2	2
494	Kepulauan Sula	Kabupaten	10,210	12,094	4	2	2
495	Pulau Morotai	Kabupaten	10,512	12,224	4	2	2

496	Pulau Taliabu	Kabupaten	10,224	12,180	3	2	2
497	Ternate	Kota	10,940	12,428	4	2	2
498	Tidore Kepulauan	Kota	10,791	12,275	4	2	1
499	Prov Papua	Provinsi	12,330	13,366	4	1	1
500	Asmat	Kabupaten	10,436	12,429	4	1	2
501	Biak Numfor	Kabupaten	10,818	12,157	4	1	1
502	Boven Digoel	Kabupaten	10,585	12,582	3	2	1
503	Deiyai	Kabupaten	9,687	12,096	3	2	1
504	Dogiyai	Kabupaten	9,964	12,190	3	2	1
505	Intan Jaya	Kabupaten	10,390	12,469	3	2	1
506	Jayapura	Kabupaten	11,099	12,454	4	2	1
507	Jayawijaya	Kabupaten	10,619	12,466	4	2	2
508	Keerom	Kabupaten	10,347	12,265	4	1	2
509	Kepulauan Yapen	Kabupaten	10,347	12,241	4	2	2
510	Lanny Jaya	Kabupaten	9,981	12,343	4	2	2
511	Mamberamo Raya	Kabupaten	9,686	12,373	1	1	1
512	Mamberamo Tengah	Kabupaten	9,989	12,343	3	1	2
513	Mappi	Kabupaten	10,308	12,459	3	1	1
514	Merauke	Kabupaten	11,184	12,709	4	2	2
515	Mimika	Kabupaten	11,950	12,816	4	1	2
516	Nabire	Kabupaten	10,943	12,338	4	2	2
517	Nduga	Kabupaten	9,790	12,350	4	2	1
518	Paniai	Kabupaten	10,259	12,193	4	2	2
519	Pegunungan Bintang	Kabupaten	10,025	12,477	3	1	2

520	Puncak	Kabupaten	9,829	12,283	4	2	2
521	Puncak Jaya	Kabupaten	10,264	12,280	4	1	2
522	Sarmi	Kabupaten	10,153	12,332	3	2	2
523	Supiori	Kabupaten	10,037	12,334	4	2	2
524	Tolikara	Kabupaten	10,151	12,330	4	1	2
525	Yahukimo	Kabupaten	10,285	12,280	4	2	2
526	Yalimo	Kabupaten	10,060	12,268	4	2	2
527	Jayapura	Kota	11,399	12,469	4	2	2
528	Prov Papua Barat	Provinsi	11,685	13,243	4	2	1
529	Fakfak	Kabupaten	10,593	12,413	4	1	2
530	Kaimana	Kabupaten	10,518	12,336	4	1	1
531	Manokwari	Kabupaten	11,011	12,392	4	1	2
532	Manokwari Selatan	Kabupaten	10,031	12,066	4	2	1
533	Maybrat	Kabupaten	9,941	12,282	4	2	2
534	Pegunungan Arfak	Kabupaten	9,692	12,165	4	1	1
535	Raja Ampat	Kabupaten	10,270	12,467	4	2	2
536	Sorong	Kabupaten	10,907	12,658	4	2	2
537	Sorong Selatan	Kabupaten	10,362	12,278	4	2	2
538	Tambrau	Kabupaten	9,821	12,376	4	1	2
539	Teluk Bintuni	Kabupaten	10,928	12,780	4	2	2
540	Teluk Wondama	Kabupaten	10,536	12,329	4	2	1
541	Sorong	Kota	11,224	12,636	4	1	2